PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG

BANDUNG
LEBIH BEDAS!



Dr. H.M. Dadang
Supriatna, S.Ip., M.Si
Bupati Bandung

LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
2024

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya sehingga Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Tahun 2024 telah selesai tepat waktu. Laporan ini merupakan salah satu perwujudan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bentuk pertanggungjawaban secara periodik atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka implementasi program/kegiatan Urusan Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2021-2026. Laporan kinerja berfungsi sebagai alat penilai, pengendali, dan pemacu kinerja setiap pegawai dan sekaligus sebagai upaya pelaksanaan SAKIP pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung.

Hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja dalam Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi seluruh pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung serta para pemangku kepentingan dalam penyusunan dan penyempurnaan kebijakan dan program/kegiatan di tahun berikutnya. Selain itu, diharapkan juga dapat menjadi umpan balik bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung untuk lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan produktif dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja sehingga terwujud Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada, diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Soreang, 17 Februari 2025

KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



H. WAWAN AHMAD RIDWAN, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
Nip. 19750601 199602 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Sesuai Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu disusun evaluasi kinerja masing-masing instansi pemerintah dalam pencapaian kegiatan pada setiap tahunnya, atau yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Adapun Dasar Hukum Penyusunan LKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Tahun 2024:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Perbup No 52 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Laporan Kinerja, Dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung

Dalam proses pencapaian tujuan, secara umum DISBUDPAR Kabupaten Bandung didukung oleh 9 Program, 21 Kegiatan dan 58 Subkegiatan yang menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Bandung.

Pada tahun 2024 DISBUDPAR telah berusaha memenuhi indikator kinerja utama, yang pengukurannya telah sesuai dengan sasaran, indikator, target yang ditetapkan, realisasi dan pencapaian target. Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa pencapaian hasil kinerja DISBUDPAR berdasarkan Perjanjian Kinerja pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Dalam indikator Nilai **Index Pembangunan Kebudayaan** capaian kinerja pada periode tahun 2024 Terealisasi **56,19 Poin** atau sebesar **110,59%**. Angka tersebut apabila dikaitkan dengan target Perubahan Renstra DISBUDPAR 2021-2026 pada tahun 2024 dari target sebesar **51 Point**. Capaian Indikator ini pada tahun 2024 melebihi target walaupun tidak signifikan hal ini disebabkan belum optimalnya formasi sumber daya manusia (SDM) yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung.

2. Dalam indikator Nilai **Index Pembangunan Kepariwisataan** capaian kinerja pada periode tahun 2024 Terealisasi **12,77 %**. Angka tersebut apabila dikaitkan dengan target Perubahan Renstra DISBUDPAR 2021-2026 pada tahun 2024 dari target sebesar **5%**.

3. Capaian kinerja Presentase persentase pertumbuhan jumlah pelaku ekonomi kreatif disbudpar pada periode tahun 2024 terealisasi **1,60 %** atau **capaian sebesar 160%** dari target pada Renstra tahun 2024 yaitu 1%. Hal ini menunjukan pertumbuhan Pelaku ekonomi kreatif yang cukup signifikan.

4. Capaian kinerja ***Meningkatnya Tatakelola Disbudpar*** yang terdiri dari dua indikator yaitu Capaian nilai AKIP dan Presentase Aset dalam kondisi baik. Walaupun Sasaran ini bukan merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung karena tidak berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung akan tetapi sasaran ini ikut menunjang kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan tugas. Adapun Capaian kinerja Indikator Capaian nilai AKIP DISBUDPAR pada tahun 2024 adalah 101.38% hal ini dikarenakan capaian nilai AKIP DISBUDPAR mencapai 81.10 poin Point sementara target yang ditetapkan adalah 81 Point. Sedangkan untuk capaian kinerja indikator presentase aset

dalam kondisi baik pada tahun 2024 mencapai 10,28% hal ini dikarenakan capaian target Persentase Aset dalam Kondisi Baik sebesar 93.2 % dari target sebesar 93% capaian kinerja ini mengalami peningkatan karena ada mutasi aset ke BKAD dan adanya penghapusan aset dalam kondisi rusak berat.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024 terdapat pelaksanaan 9 Program, 21 Kegiatan dan 58 Subkegiatan yang dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD sebesar Rp. **32.435.458.254** yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. **27.753.094.994** dan Belanja Modal sebesar Rp. **4.682.363.260.** selain itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. **1.450.000.000** dari Retribusi Daerah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
IKHTISAR EKSEKUTIF ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A. LATAR BELAKANG 1
B. GAMBARAN UMUM 2
C. ISU STRATEGIS 8
D. DASAR HUKUM 9
E. SISTEMATIKA PENULISAN 10
BAB II **11**
PERENCANAAN KINERJA **11**
A. PERENCANAAN STRATEGIS 11
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA 17
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 20
BAB III **22**
AKUNTABILITAS KINERJA **22**
A. TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA DISBUDPAR KABUPATEN BANDUNG 22
B. CAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANDUNG 42
C. PRESTASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 70
BAB IV **77**
PENUTUP **77**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintahan daerah memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola yang baik guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Akuntabilitas publik menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan penggunaan sumber daya yang dilakukan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas ini mencerminkan transparansi serta pengelolaan sumber daya publik yang bertanggung jawab demi mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan (Mursidi, 2013:44). Dengan penerapan sistem akuntabilitas yang baik, instansi pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kinerjanya secara optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). LKIP merupakan dokumen tahunan yang berisi laporan pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan strategisnya. Laporan ini tidak hanya sebagai alat evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, tetapi juga sebagai dasar perbaikan dan pengambilan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Tahun 2024 berlandaskan pada regulasi yang berlaku, di antaranya:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Bupati Bandung Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Laporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Tahun 2024, diharapkan dapat:

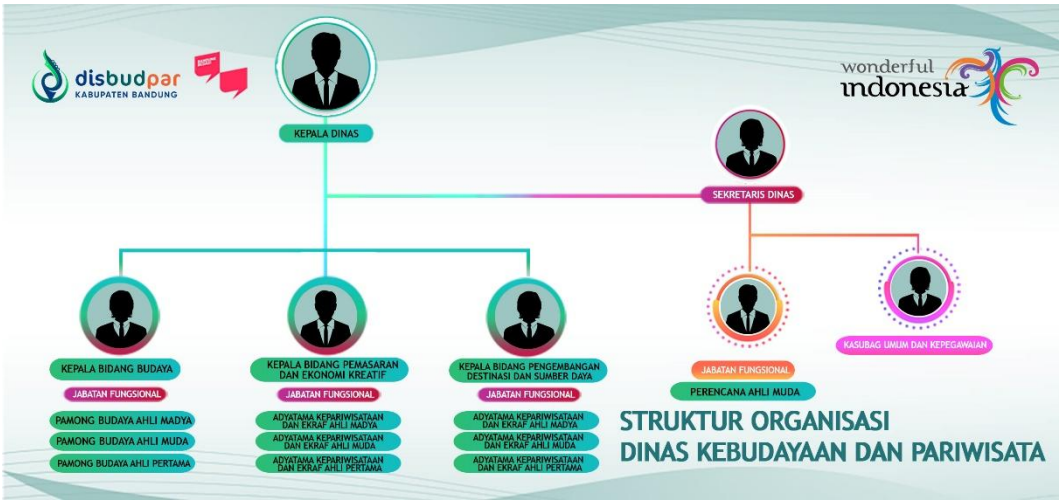
1. Menyediakan informasi yang akurat mengenai pencapaian kinerja dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung.
2. Mendorong peningkatan efektivitas serta efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
3. Menjadi instrumen dalam meningkatkan daya saing sektor kebudayaan dan pariwisata melalui kebijakan berbasis data dan evaluasi kinerja.
4. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah melalui transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas serta program kerja.

Dengan demikian, laporan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga sebagai strategi dalam meningkatkan pelayanan dan pembangunan sektor kebudayaan serta pariwisata di Kabupaten Bandung.

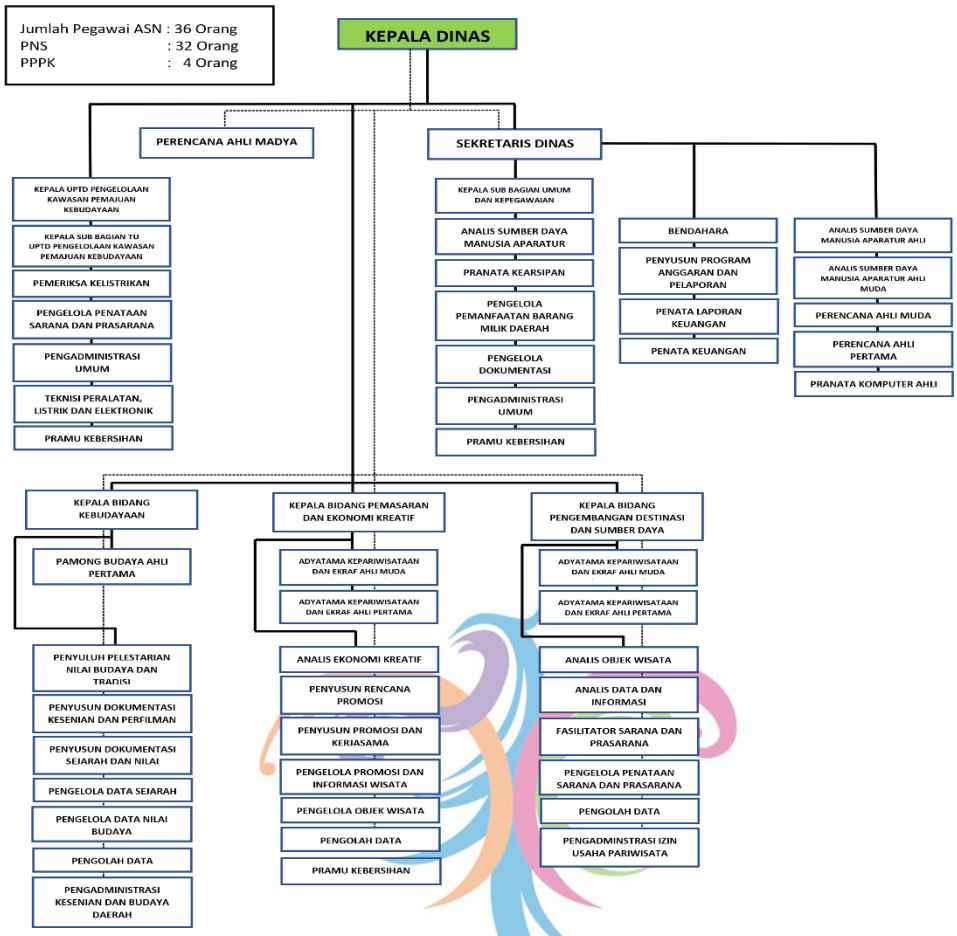
B. GAMBARAN UMUM

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Bandung mengacu pada peraturan Bupati Bandung nomor 1 tahun 2022 tentang kedudukan dan susunan perangkat daerah adalah sebagai berikut:



Gambar 1
Bagan Struktur Organisasi



Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi
Berdasarkan Peta Jabatan pada tahun 2024



Gambar 3.2
Bagan Struktur Organisasi
UPTD Pengelolaan Kawasam Pemajuan Kebudayaan

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Pembentukan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 103 Tahun 2023 tentang Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar. Kedudukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung, yang selanjutnya disingkat DISBUDPAR Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai urusan wab non pelayanan dasar dan urusan pilihan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.

Secara luas, tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung menurut Peraturan Bupati Bandung Nomor 103 Tahun 2023 adalah untuk mengelola, mengatur, dan mengembangkan kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata. Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang memiliki tanggung jawab besar, yaitu memimpin, merumuskan kebijakan, mengatur, membina, mengendalikan, serta mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Bandung. Kepala Dinas juga harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang ada, memastikan bahwa urusan-urusan yang terkait dengan kebudayaan dan pariwisata berjalan dengan baik, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, demi tercapainya tujuan pengembangan dan pelestarian kebudayaan serta kemajuan sektor pariwisata.

Tugas Pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Menurut Perbup Nomor 103 Tahun 2023 Disbudpar yaitu;

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
2. Kepala Dinas mempunyai tugas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

3. Kondisi Pegawai

Berjalannya organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, DISBUDPAR didukung oleh pegawai sebanyak ------ orang, dengan Profil Demografi sebagai berikut:



Gambar 1.3
Profil Demografi Pegawai DISBUDPAR Tahun 2024

4. Aset DISBUDPAR Kabupaten Bandung

Dalam rangka menunjang aktivitas kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata maka perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai, adapun aset yang tersedia di DISBUDPAR berdasarkan jenis aset pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

NO.	JENIS ASET	SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2024	AKUMULASI PENYUSUTAN SD 31 DESEMBER 2024	NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2024
1	Tanah	15.610.102.724,00	-	15.610.102.724,00
2	Peralatan dan Mesin	16.258.326.374,00	13.432.035.451	2.826.290.923,00
3	Gedung dan Bangunan	133.052.590.637,00	23.330.580.732	109.722.009.905,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	784.612.016,00	374.216.704	410.395.312,00
5	Aset Tetap Lainnya	3.613.430.782,00		3.613.430.782,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	445.092.350,00	-	445.092.350,00
Total Aset Tetap		**169.764.154.883,00**	**37.136.832.887**	**132.627.321.996,00**
7	Aset Tak Berwujud			-
8	Aset Lain-Lain/Rusak Berat	3.204.972.688,00	1.848.389.584,00	1.356.583.104,00
9	Aset yang dimanfaatkan pihak lain			-
Total Aset Lainnya		**3.204.972.688,00**	**1.848.389.584,00**	**1.356.583.104,00**
Total Aset Tetap + Aset Lainnya		**172.969.127.571,00**	**38.985.222.471,00**	**133.983.905.100,00**

Tabel.1
Aset Disbudpar Kabupaten Bandung 2024 Berdasarkan Jenis Aset

5. Keuangan

Dukungan dana atau anggaran untuk melaksanakan program, kegiatan dan Sub Kegiatan DISBUDPAR Kabupaten Bandung pada tahun 2024 berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar **Rp. 32.435.458.254.,** (*Tiga Puluh Dua Miliyar, Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta, Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu, Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).* Ringkasan anggaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung ditunjukkan pada Tabel 1.2, sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**1.450.000.000**
Retribusi Daerah	1.450.000.000
Belanja Daerah	**32.435.458.254**
Belanja Operasi	**27.753.094.994**
Belanja Pegawai	8.758.704.701
Belanja Barang/jasa	18.464.390.293
Belanja Hibah	530.000.000
Belanja Modal	**4.682.363.260**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.166.744.060
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.515.619.200

Tabel 1.1
Ringkasan Anggaran DISBUDPAR Tahun 2024

Rincian program dan kegiatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung ditunjukan pada Tabel 1.2 sebagai berikut:

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Rp 2.974.886.000,00**
2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp 1.561.000.000,00**
2.22.02.2.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp 1.413.886.000,00**
2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Rp 65.570.000,00**
2.22.03.2.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp 65.570.000,00**

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Rp 685.849.233,00**
2.22.05.2.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Rp 250.831.400,00**
2.22.05.2.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kot**	**Rp 435.017.833,00**
2.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Rp 100.000.000,00**
2.22.06.2.01	**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	**Rp 100.000.000,00**
3.26.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rp 17.530.434.021,00**
3.26.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Rp 305.583.880,00**
3.26.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Rp 8.689.129.701,00**
3.26.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Rp 42.250.000,00**
3.26.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Rp 32.072.000,00**
3.26.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rp 226.830.000,00**
3.26.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Rp 894.543.071,00**
3.26.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Rp 377.195.584,00**
3.26.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp 5.393.507.965,00**
3.26.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp 1.496.746.820,00**
3.26.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Rp 72.575.000,00**
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Rp 5.415.203.800,00**
3.26.02.2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Rp 5.364.843.800,00**
3.26.02.2.04	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten / Kota**	**Rp 50.360.000,00**

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Rp 2.670.515.800,00**
3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Rp 2.670.515.800,00**
3.26.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Rp 253.670.000,00**
3.26.04.2.02	**Pengembangan Sistem Ekonomi Kreatif**	**Rp 253.670.000,00**
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Rp 2.739.329.400,00**
3.26.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Rp 2.415.342.400,00**
3.26.05.2.02	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Rp 323.987.000,00**
JUMLAH		**Rp 32.435.458.254,00**

Tabel I.2

Rincian Anggaran DISBUDPAR Tahun 2024

C. ISU STRATEGIS

Dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Bandung didasarkan isu-isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung sehingga program dan kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Analisis Permasalahan dan isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas dan fungsi DISBUDPAR dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian

kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dapat kita identifikasi dari permasalahanpermasalahan yang terjadi yaitu

No	Permasalahan Utama / Isu Strategis DISBUDPAR
1	Infrastruktur Menuju Objek Destinasi Wisata di Rasa Masih Kurang Baik oleh Wisatawan
2	Sarana dan Prasana Pendukung di Sekitar Objek Wisata kurang mampu bersaing dengan daerah lain membuat wisatawan tidak bertahan Tinggal lebih dari satu hari di Kabupaten Bandung
3	Perlunya Peningkatan kapasitas Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan
4	Masih banyaknya objek cagar budaya yang belum diteliti dan didaftarkan untuk ditetapkan
5	Belum adanya museum sejarah daerah di Kabupaten Bandung

Tabel I.3

Permasalahan Utama / Isu Strategis

D. DASAR HUKUM

Di samping laporan tahunan yang secara rutin disusun pada akhir tahun anggaran, sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu disusun evaluasi kinerja masing-masing instansi pemerintah dalam pencapaian kegiatan pada setiap tahunnya, atau yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Adapun Dasar Hukum Penyusunan LKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Tahun 2024:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apataur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Perbup No 52 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Laporan Kinerja, Dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR
IKHTISAR EKSEKUTIF
DAFTAR ISI

BAB I 1
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
B. GAMBARAN UMUM
C. ISU STRATEGIS
D. DASAR HUKUM
E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. PERENCANAAN STRATEGIS
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA DISBUDPAR KABUPATEN BANDUNG
B. CAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANDUNG
C. PRESTASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

BAB IV
PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Keberhasilan Perangkat Daerah harus didukung oleh adanya perencanaan yang baik. Maka perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Perencanaan Strategis merupakan sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai acuan apa yang akan dicapai pada 5 tahun mendatang dan bagaimana cara mencapainya setiap tahunnya serta target-target apa yang ingin diwujudkan setiap tahapan satu tahunnya untuk mencapai tujuan 5 tahunan. Oleh Karena itu perencanaan tahunan atau Rencana Kerja (Renja) tahunan merupakan turunan dari tahapan renstra per tahun. Maka penyusunan Rencana Kerja Tahunan tidak boleh lepas dari Renstra yang telah disusun sebelumnya.

Dokumen Renstra DISBUDPAR Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS).

a. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir cascading RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang dijabarkan dalam Visi dan Misi tersebut menjadi landasan strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Bandung 2021-2026, yang diharapkan dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata. Bagan alir cascading RPJMD ini menggambarkan hubungan antara arah kebijakan, program, dan kegiatan yang terintegrasi dengan berbagai aspek pembangunan, serta sebagai pedoman dalam pencapaian visi pembangunan Kabupaten Bandung.

VISI (KEPALA DAERAH)	MISI (KEPALA DAERAH)	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera	Membangkitkan Daya Saing Daerah	Meningkatkan daya saing perekonomian daerah	Meningkatnya daya saing pariwisata
	Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja kelembagaan dalam pelayanan publik	Meningkatnya kualitas e-goverment melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur, tata kelola pemerintahan, dan penyelenggaraan pelayanan publik

Tabel 2.1
Ringkasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Bandung
Tahun 2021-2026

Berdasarakan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah, serta tugas pokok dan fungsinya, Disbudpar Kabupaten Bandung mendukung pada pencapaian Misi1 yaitu *Membangkitkan Daya Saing Daerah*, Tujuan RPJMD *Meningkatkan daya saing perekonomian daerah*, Sasaran RPJMD *Meningkatnya daya saing pariwisata*. Misi 4 yaitu *Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan*, Tujuan *Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja kelembagaan dalam pelayanan publik*, Sasaran *Meningkatnya kualitas e-goverment melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur, tata Kelola pemerintahan, dan penyelenggaraan pelayanan public.*

b. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

1) Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung salama 5 (lima) tahun anggaran adalah:

a) Meningkatkan daya saing pariwisata Melalui Kolaborasi dan Integrasi Kearifan Lokal, Alam dan Budaya Kabupaten Bandung; dan
b) Meningkatnya tata kelola internal pemerintahan DISBUDPAR

2) Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

a) Meningkatnya kualitas pengembangan objek kebudayaan dan Pengelolaan sejarah, cagar budaya, dan museum.
b) Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan.
c) Meningkatnya Rata-rata lama tinggal wisatawan
d) Meningkatnya Belanja Wisatawan
e) Meningkatnya Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif
f) Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas DISBUDPAR.

Tujuan PD	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Satuan	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
MENINGKATNYA DAYA SAING PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KEBUDAYAAN MELALUI KOLABORASI KEARIFAN LOKAL, ALAM DAN BUDAYA DI KABUPATEN BANDUNG	PERSENTASE SUBSEKTOR EKONOMI KREATIF YANG MEMILIKI EKOSISTEM MAPAN	%	1%	1%				Meningkatnya Kualitas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Bandung	JUMLAH PELAKU EKRAF YANG TERSERTIFIKASI	Orang	250	350			
	INDEKS TOURISM BRAND AWARNESS	%	1,5%	2%					Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	5%	5%	5%	5%	5%
	PERSENTASE DESTINASI YANG CHSE	%	1,5%	2%					Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	5%	5%	5%	5%	5%
	PERSENTASE INDUSTRI PARIWISATA YANG HALAL	%	1,5%	2%					Persentase Peningkatan Rata-rata tinggal Wisatawan	%	5%	5%	5%	5%	5%
	INDEKS PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN	%			5%	5%	5%		Persentase Peningkatan rata rata belanja Wisatawan	%	5%	5%	5%	5%	5%
	INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN	Point	49 Point	50 Point	51 Point	52,25 Point	52,50 Point		JUMLAH CAGAR BUDAYA, SEJARAH DAERAH YANG TERLESTARIKAN DAN MUSEUM YANG TERKELOLA	Objek	5 Objek	10 Objek			
									Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang ditetapkan	%	9%	18%	27%	27%	27%
	PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH PELAKU EKONOMI KREATIF	%			1%	1%	1%		Peningkatan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	%	2%	2%	2%	2%	2%
MENINGKATNYA TATAKELOLA PEMERINTAHAN DISBUDPAR	PERSENTASE ASET DALAM KONDISI BAIK	%	92,50	93,00	93,25	93,50	93,75	MENINGKATNYA KAPASITAS DAN KAPABILITAS INTERNAL DISBUDPAR	PERSENTASE ASET DALAM KONDISI BAIK	%	92,50	93,00	93,25	93,50	93,75
	NILAI LAKIP DISBUDPAR	Point	74	79	80	81	82		NILAI LAKIP DISBUDPAR	Point	74	79	80	81	82

Tabel 2.2

Sasaran Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung

c. Strategi, Program dan Kegiatan

Dalam upaya pencapaian target pada Rencana Strategis di Tahun 2024, DISBUDPAR Kabupaten Bandung didukung oleh 9 program, 21 kegiatan, 58 subkegiatan serta Indikator Kinerja. Program dan kegiatan, subkegiatan dan Indikator Kinerja tersebut ditunjukan pada tabel sebagai berikut:

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	**Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan**
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Borang Kebudayaan yang terkelola**
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Jenis Kesenian Tradisional yang dilestarikan Jumlah Lembaga Adat yang di Bina**
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	**Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan dan dilestarikan**
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**Prosentase Cagar Budaya Peringkat Kabupaten yang akan ditetapkan**
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kot	**Jumlah Cagar Budaya yang sudah ditetapkan**
Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	**Prosentase museum yang dikelola**
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	**Terbangunnya museum sejarah Daerah**
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Aset dalam kondisi baik - Nilai LAKIP DISBUDPAR**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Prosentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Prosentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat**
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Prosentase Pemenuhan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Prosentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	**Jumlah Desa Wisata yang ditata Jumlah Destinasi Baru**
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	**Persentase Destinasi pariwisata kabupaten Bandung yang terkelola**
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata
Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten / Kota	**Persentase Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah yang terlayani**
Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	**Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara dan mancanegara yang datang ke Kabupaten Bandung**
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Jumlah promosi pariwisata secara offline maupun online**
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota,Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	**Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang akan di daftarkan HAKI**
Pengembangan Sistem Ekonomi Kreatif	**Peningkatan Kapasitas Jejaring Komunitas Ekraf**
Fasilitasi Pendanaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi
Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	**Prosentase Sumber Daya Manusia Pariwsata dan Ekonomi Kraetif yang telah**
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**Jumlah kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang ditingkatkan**
Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	**Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Ekraf**
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif

Tabel 2.3
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Untuk mengukur sejauh mana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing tujuan strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada setiap tahunnya. Indikator kinerja masing-masing tujuan tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Untuk memastikan pencapaian target kinerja yang optimal, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Pemantauan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kendala dan mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Selain itu, sinergi dengan berbagai pihak terkait, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, juga akan diperkuat guna mendukung pengembangan sektor kebudayaan dan pariwisata yang lebih berkelanjutan. Dengan strategi ini, diharapkan sektor kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Bandung dapat tumbuh sebagai salah satu pilar utama perekonomian daerah yang berkontribusi pada

kesejahteraan masyarakat dan pelestarian warisan budaya**.** berikut target yang ingin dicapai di tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG 2022-2026		
PERANGKAT DAERAH	**RPJMD-P 2021-2026**	**RENSTRA-P 2021-2016**
	IKU PD - RPJMD	**IKU PD - RENSTRA**
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Indeks pembangunan kebudayaan	Indeks pembangunan kebudayaan
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Persentase objek sejarah, cagar budaya, dan museum yang terpelihara dan terlindungi	
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	Nilai SAKIP
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Indeks tourism brand awareness	
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Indeks Pembangunan Kepariwisataan	Indeks Pembangunan Kepariwisataan
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Persentase destinasi wisata yang CHSE	
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Persentase destinasi wisata halal	
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Persentase sub sektor ekonomi kreatif yang memiliki ekosistem mapan	
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Rata-rata tinggal wisatawan	
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan rata rata belanja wisatawan	
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Peningkatan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama DISBUDPAR

Sasaran strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui

serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan, dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor kebudayaan dan pariwisata akan menjadi fokus utama. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan mengadakan pelatihan dan workshop untuk memperkuat keterampilan masyarakat lokal, pelaku usaha, serta aparatur pemerintah dalam mengelola dan mempromosikan potensi budaya dan wisata daerah. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisatawan, tetapi juga untuk menciptakan peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan agar sektor kebudayaan dan pariwisata dapat berkembang secara sinergis dan berkelanjutan, menciptakan Kabupaten Bandung sebagai destinasi wisata yang unggul dan berdaya saing tinggi.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga akan terus berinovasi dalam menghadirkan program-program baru yang dapat memperkaya pengalaman wisatawan serta melestarikan kekayaan budaya daerah. Dengan pendekatan yang berbasis pada keberlanjutan dan pemanfaatan teknologi, diharapkan sektor ini dapat memberikan dampak positif yang lebih luas, tidak hanya pada ekonomi daerah, tetapi juga pada peningkatan citra Kabupaten Bandung sebagai tujuan wisata yang ramah lingkungan dan berbudaya.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Selanjutnya, peraturan dimaksud menjelaskan bahwa melalui perjanjian kinerja, diharapkan akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja yang dibuat oleh instansi pemerintah, termasuk DISBUDPAR, bertujuan untuk memastikan adanya pemahaman yang jelas dan kesepakatan bersama antara pimpinan dan penerima amanah mengenai target kinerja yang ingin dicapai. Hal ini mencakup penetapan indikator kinerja yang terukur untuk mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan program atau kegiatan yang telah disepakati. Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan dapat tercipta akuntabilitas yang lebih baik, serta terjalin komunikasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat, sehingga tujuan instansi dapat tercapai dengan optimal. Setiap instansi diharapkan dapat menyusun perjanjian kinerja secara terstruktur dan transparan untuk memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja.

Perjanjian kinerja yang dibuat oleh DISBUDPAR tidak hanya berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, tetapi juga sebagai alat ukur untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan dampak positif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, pimpinan instansi yang lebih tinggi memberikan panduan yang jelas terkait arah dan prioritas kebijakan, sementara pimpinan instansi yang lebih rendah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan tersebut dilakukan secara efektif dan efisien.

Selain itu, perjanjian kinerja juga memberikan ruang untuk evaluasi dan revisi apabila terdapat perubahan dalam prioritas atau kondisi yang mempengaruhi pencapaian kinerja. Melalui sistem ini, dapat dilakukan pemantauan secara berkala terhadap hasil yang telah dicapai dan, jika diperlukan, dilakukan penyesuaian agar sasaran kinerja tetap dapat tercapai sesuai dengan

harapan. Proses ini sangat penting untuk menciptakan budaya akuntabilitas dan transparansi di setiap instansi pemerintah, termasuk DISBUDPAR, guna mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara formal, pernyataan kinerja/perjanjian kinerja DISBUDPAR yang yang mengacu pada Peraturan Menteri dimaksud terdapat dalam daftar lampiran, dan secara ringkas diilustrasikan dalam matriks berikut:

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	**Meningkatnya daya saing pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan melalui kolaborasi dan integrasi kearipan lokal, alam dan budaya di Kabupaten Bandung**	• **Indeks Pembangunan Kebudayaan** • **Indeks Pembangunan Kepariwisataan** • **Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif**	• **51.00 Poin** • **5.00 %** • **1.00 %**
2	Meningkatnya kualitas pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan di kabupaten bandung	• Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan • Persentase peningkatan Rata - rata lama tinggal Wisatawan • persentase peningkatan Rata rata belanja wisatawan • Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan • Peningkatan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	• 5.00 % • 5.00 % • 5.00 % • 27.00 % • 2.00 %
II.	**Meningkatnya Tatakelola Disbudpar**	• **Nilai LAKIP Disbudpar** • **Persentase Aset Dalam Kondisi Baik**	• **80.00 Poin** • **93.00 %**
1	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Disbudpar	• Nilai LAKIP DISBUDPAR • Persentase Aset Dalam Kondisi Baik	• 80.00 Poin • 93.00 %

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.974.886.000,00	APBD-P
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	65.570.000,00	APBD-P
3	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	685.849.233,00	APBD-P
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	100.000.000,00	APBD-P
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.530.434.021,00	APBD-P
6	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	5.415.203.800,00	APBD-P
7	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.670.515.800,00	APBD-P
8	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	253.670.000,00	APBD-P
9	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.739.329.400,00	APBD-P
	TOTAL	**32.435.458.254,00**	

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja DISBUDPAR 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA DISBUDPAR KABUPATEN BANDUNG

Dalam rangka mewujudkan tujuan jangka panjang yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung berupaya untuk menciptakan kemajuan yang berkelanjutan di bidang kebudayaan, ekonomi kreatif, dan pariwisata. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejumlah indikator kinerja telah ditetapkan yang akan menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan setiap program dan kebijakan yang dijalankan. Tujuan-tujuan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bandung melalui pemanfaatan sumber daya alam, budaya, serta peningkatan kapasitas aparatur yang ada.

Berikut ini adalah uraian mengenai tujuan utama yang hendak dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung beserta indikator kinerjanya yang menjadi dasar pengukuran keberhasilan serta pencapaian Kinerja

1. **Meningkatnya daya saing pariwisata, Ekonomi kreatif dan Kebudayaan Melalui Kolaborasi dan Integrasi Kearipan Lokal, Alam dan Budaya**

   Salah satu fokus utama dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung adalah untuk meningkatkan daya saing sektor kebudayaan, ekonomi kreatif, dan pariwisata. Hal ini dilakukan melalui berbagai upaya strategis yang melibatkan kolaborasi antara sektor pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, dengan mengintegrasikan kearifan lokal, alam, dan budaya sebagai kekuatan utama. Tujuan ini bertujuan untuk menciptakan sektor pariwisata yang berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, serta memperkuat identitas budaya lokal yang dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.

   Untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan ini, terdapat tiga indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung, yaitu Indeks Pembangunan Kebudayaan, Indeks Pembangunan Kepariwisataan, dan Persentase Pertumbuhan Pelaku

Ekonomi Kreatif. Masing-masing indikator ini memiliki target yang harus dicapai pada tahun 2024, yang akan menjadi dasar evaluasi terhadap efektivitas kebijakan dan program yang diterapkan. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai indeks-indeks kinerja tersebut, beserta analisis capaian dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerjanya.

a. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indikator pertama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam sektor kebudayaan adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan. Indeks ini mengukur tingkat pencapaian dalam pengembangan, pelestarian, dan promosi kebudayaan daerah. Adapun target yang ditetapkan dalam Renstra tahun 2024 adalah 51 poin, yang mencerminkan keberhasilan dalam melestarikan kebudayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan Indeks Pembangunan Kebudayaan dengan Target pada Renstra tahun 2024 adalah 51 poin dengan capaian tahun 2024 sebesar 56.19 poin.

1) Capaian Kinerja

Dalam menganalisis capaian kinerja, akan dilihat sejauh mana hasil yang tercapai pada tahun ini dibandingkan dengan target yang telah ditentukan, serta upaya yang telah dilakukan untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan lokal di Kabupaten Bandung. Capaian ini dapat mencakup pencapaian dalam hal pelestarian seni budaya, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya budaya, serta dukungan terhadap pelaku seni lokal. Target pada Renstra tahun 2024 adalah 51 poin dengan capaian tahun 2024 sebesar 56.19 poin. Berikut gambar capaian kinerja tahun 2024;



Gambar 3.1
Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan tahun 2024

Seperti yang dapat dilihat pada gambar capaian kinerja tahun 2024, hasil yang tercapai melebihi target yang ditetapkan dalam Renstra, yakni 56,19 poin, sementara target awal adalah 51 poin. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal di Kabupaten Bandung. Capaian ini mencerminkan kerjasama yang solid antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku seni dalam menjaga dan memperkenalkan kebudayaan lokal, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya budaya sebagai bagian dari identitas daerah.

Penilaian terhadap capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan ditentukan melalui 7 Dimensi. Berikut tabel penentuan penilaian indeks pembangunan kebudayaan;

NO	DIMENSI	IPK
1	Ekonomi Budaya	30
2	Pendidikan	54,86
3	Ketahanan Sosil Budaya	69,36
4	Warisan Budaya	55,10
5	Kebebasan Ekspresi Budaya	61,05
6	Budaya Literasi	83,46
7	Gender	56,33
Nilai IPK Kabupaten Bandung		**56,19**

Tabel 3.1
Tabel Kajian Penilain Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 51,00 poin dan terealisasi 56,19 poin, dengan persentase ketercapaian sebesar 110,59%. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan.

Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan di Kabupaten Bandung. Data ini diperoleh berdasarkan kajian yang dilakukan pada tahun 2024 untuk menilai realisasi Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Bandung, dengan menggunakan 7 dimensi, yaitu: Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Kebebasan Ekspresi Budaya, Budaya Literasi dan Gender.

Melalui indikator-indikator tersebut, IPK dapat menggambarkan sejauh mana kebudayaan lokal terus berkembang dan mendapat perhatian di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Realisasi yang melebihi target ini menunjukkan upaya nyata dalam meningkatkan kualitas pembangunan kebudayaan dan pengembangan potensi daerah melalui kebudayaan yang berkelanjutan.

2) Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya sangat penting untuk mengukur sejauh mana ada perkembangan dalam sektor kebudayaan. Jika terjadi peningkatan, maka bisa dilihat sebagai bukti bahwa kebijakan yang diterapkan berjalan efektif. Sebaliknya, penurunan capaian bisa menjadi indikator bahwa terdapat masalah dalam implementasi kebijakan atau faktor eksternal yang mempengaruhi hasil.



Gambar 3.2
Perbandingan Indeks Pembangunan Kebudayaan
dengan tahun sebelumnya

Pada tahun 2023, Indeks Pembangunan Kebudayaan tercatat sebesar 55,07 poin dengan persentase ketercapaian 105,9%. Sementara itu, pada tahun 2024, IPK mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 56,19 poin dan persentase ketercapaian 110,59%.

Peningkatan ini menunjukkan bahwa kebijakan dan upaya yang dilakukan dalam pemajuan kebudayaan Kabupaten Bandung telah memberikan hasil yang positif dan berkelanjutan. Selanjutnya, akan ditampilkan gambar capaian kinerja tahun 2024.

3) Perbandingan Capaian kinerja dengan target resntra DISBUDPAR

Capaian kinerja juga akan dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Renstra DISBUDPAR, guna mengetahui apakah pencapaian yang diperoleh sudah sesuai dengan rencana strategis yang ada. Pada Renstra tahun 2024, target yang ditetapkan adalah 51,00 poin, dan tahun 2024 berhasil mencapai 56,19 poin, melebihi target yang ditetapkan sebesar 10,14%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa program-program yang telah dijalankan oleh DISBUDPAR Kabupaten Bandung sudah berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang lebih baik daripada yang direncanakan. Namun, meskipun capaian tersebut melebihi target, evaluasi terus-menerus tetap diperlukan untuk memastikan bahwa pengembangan kebudayaan tetap relevan dan berdampak positif di masa mendatang.

Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai kinerja tahun 2024, berikut disajikan grafis yang memperlihatkan perbandingan antara target Resntra dengan capaian tahun 2024.



Gambar 3.3
Perbandingan Indeks Pembangunan Kebudayaan dengan Target Renstra

4) Perbandingan capaian kinerja dengan target Nasional

Membandingkan hasil yang dicapai di Kabupaten Bandung dengan target nasional di bidang kebudayaan memberikan gambaran apakah Kabupaten Bandung berada dalam jalur yang sama dengan upaya nasional dalam meningkatkan dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Perbandingan ini akan memberikan konteks yang lebih luas dan dapat menjadi acuan bagi kebijakan yang lebih terarah di masa depan.

Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Kebudayaan Nasional Indonesia mencapai skor 57,13 poin berdasarkan data yang di dapat pada website Kemdikbud, kemudian Target nasional untuk Indeks Pembangunan Kebudayaan pada tahun 2045 ditetapkan sebesar 68,15 poin. Dengan demikian, terdapat peningkatan target sebesar 11,02 poin dalam kurun waktu 22 tahun, yang setara dengan kenaikan rata-rata sekitar 0,5 poin per tahun.

Menganalisis capaian Kabupaten Bandung dalam konteks target nasional ini penting untuk menilai keselarasan dan kontribusi daerah terhadap tujuan pembangunan kebudayaan nasional. Jika Kabupaten Bandung memiliki skor Indeks Pembangunan Kebudayaan yang sebanding atau lebih tinggi dibandingkan dengan target nasional, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program kebudayaan daerah mendukung arah pembangunan nasional. Sebaliknya, jika skor IPK Kabupaten Bandung lebih rendah, maka perlu evaluasi dan penyesuaian strategi untuk memastikan bahwa upaya daerah sejalan dengan target nasional, sehingga kontribusi daerah dapat optimal dalam mencapai tujuan pembangunan kebudayaan Indonesia.

Berikut tabel perbandingan target nasional dengan capaian target Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung;

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2024	Capaian tahun 2024	Target Standar Nasional	
			2024	2045
Indeks Pembangunan Kebudayaan	56,19 poin	110,59 %	57,13 poin	68,15 poin

Tabel 3.2
Tabel Perbandingan Target Indeks Pembangunan Kebudayaan dengan Target Nasional

5) Faktor Pendukung dan Penghambat Indek Pembangunan Kebudayaan

Analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya atau tidak tercapainya kinerja dalam sektor kebudayaan akan sangat berguna. Beberapa faktor pendukung yang dapat mendorong tercapainya tujuan ini antara lain partisipasi masyarakat, dukungan anggaran, dan kolaborasi dengan organisasi budaya. Di sisi lain, faktor penghambat seperti kurangnya edukasi budaya, keterbatasan sarana dan prasarana, atau minimnya pelatihan bagi pelaku seni dapat menghambat tercapainya target yang diinginkan.

Selain daripada itu realisasi setiap target dari program kegiatan dan subkegiatan menjadi yang utama dalam peningkatan indeks pembangunan kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut;

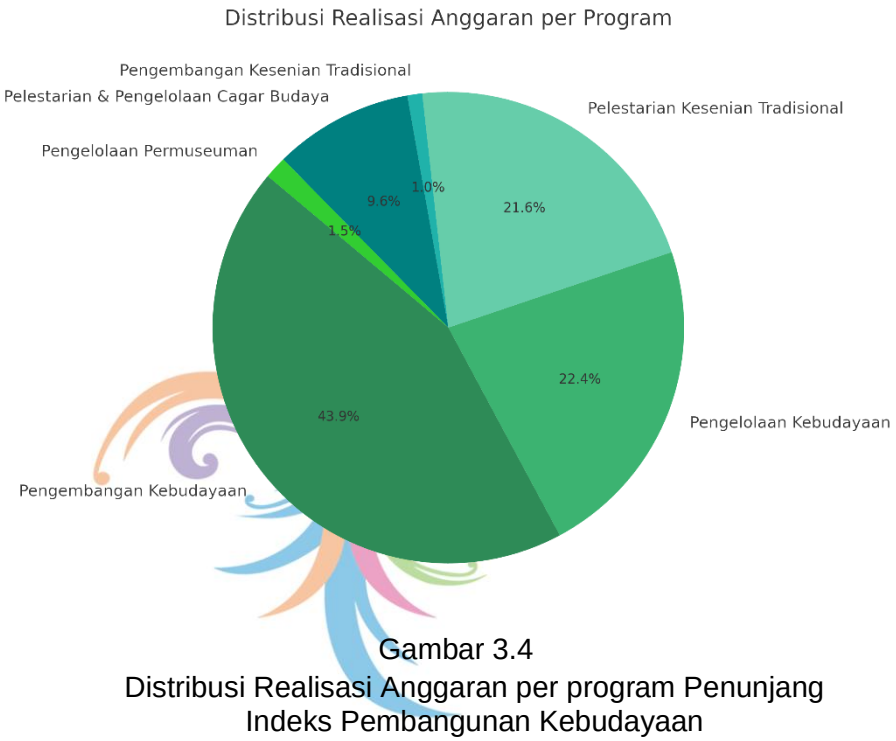
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN (%)
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	**Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan**	**19%**	**2,974,886,000**	**27%**	**2,846,772,582**	95.69
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Borang Kebudayaan yang terkelola**	**3 Borang**	**1,561,000,000**	**3 Borang**	**1,448,431,838**	92.79
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	3 Objek	1,561,000,000	3 Objek	1,448,431,838	92.79
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**- Jumlah Jenis Kesenian Tradisional yang dilestarikan - Jumlah Lembaga Adat yang di Bina**	**1 Lembaga Adat**	**1,413,886,000**		**1,398,340,744**	98.90
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	166,334,000	1 Objek	155,900,744	93.73
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	14 Laporan	1,247,552,000	12 Laporan	1,242,440,000	99.59

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN (%)
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			**65,570,000**		**65,568,600**	100.00
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			**65,570,000**		**65,568,600**	99.998
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	5 Orang	65,570,000	50 Orang	65,568,600	99.998
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	**Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan dan dilestarikan**	**5%**	**685,849,233**	**5%**	**618,577,050**	90.19
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**Prosentase Cagar Budaya Peringkat Kabupaten yang akan ditetapkan**	**5%**	**250,831,400**	**5%**	**237,060,050**	94.51
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	7 Objek	250,831,400	7 Objek	237,060,050	94.51
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kot	**Jumlah Cagar Budaya yang sudah ditetapkan**	**8 Cagar Budaya**	**435,017,833**	**15 Cagar Budaya**	**381,517,000**	87.70
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN KINERJA**	**ANGGARAN (Rp)**	**REALISASI CAPAIAN KINERJA**	**REALISASI ANGGARAN (Rp)**	**TINGKAT CAPAIAN (%)**
Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	8 Objek	435,017,833	15 Objek	381,517,000	87.70
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	**Prosentase museum yang dikelola**	**5%**	**100,000,000**	**5%**	**99,855,600**	99.86
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	**Terbangunnya museum sejarah Daerah**	**1 Museum**	**100,000,000**	**1 Museum**	**99,855,600**	99.86
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	100,000,000	0,5 Unit	99,855,600	99.86
JUMLAH			**3.826.305.233**		**3.630.773.832**	**94.89**

Tabel 3.3
Tabel Realisasi Program kegiatan dan subkegiatan penujang Indeks Pembangunan Kebudayaan

Dalam rangka mendukung pengembangan kebudayaan, pelestarian kesenian tradisional, serta pengelolaan cagar budaya dan permuseuman di Kabupaten Bandung, sejumlah program telah dijalankan dengan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan ini

menyajikan perbandingan antara target dan realisasi anggaran, serta tingkat pencapaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai distribusi anggaran dan capaian kinerja, berikut adalah visualisasi dalam bentuk diagram:



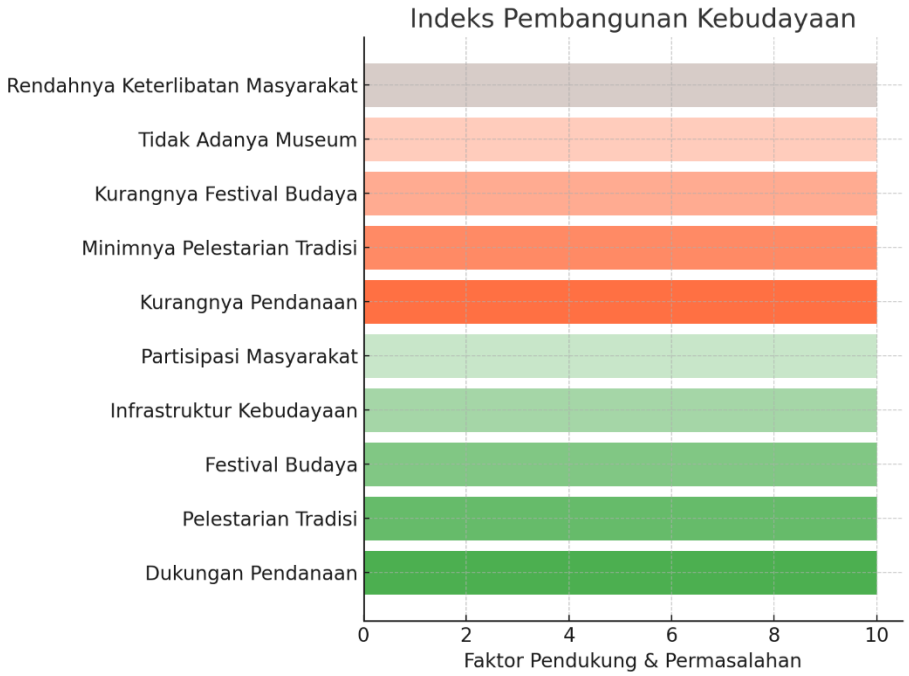
Gambar 3.4
Distribusi Realisasi Anggaran per program Penunjang Indeks Pembangunan Kebudayaan

Selain berfungsi sebagai identitas daerah, pembangunan kebudayaan juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor ekonomi kreatif, pariwisata, dan edukasi. Oleh karena itu, upaya pelestarian dan pengembangan budaya harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan masyarakat.

Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi pembangunan kebudayaan. Beberapa faktor pendukung dapat mempercepat pertumbuhan kebudayaan, sementara sejumlah permasalahan menjadi kendala yang harus segera diatasi agar kebudayaan dapat terus berkembang secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, terdapat faktor pendukung yang mempercepat pembangunan kebudayaan, namun juga terdapat permasalahan yang menjadi hambatan dalam proses tersebut. Berikut

adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Kebudayaan sebagai berikut;

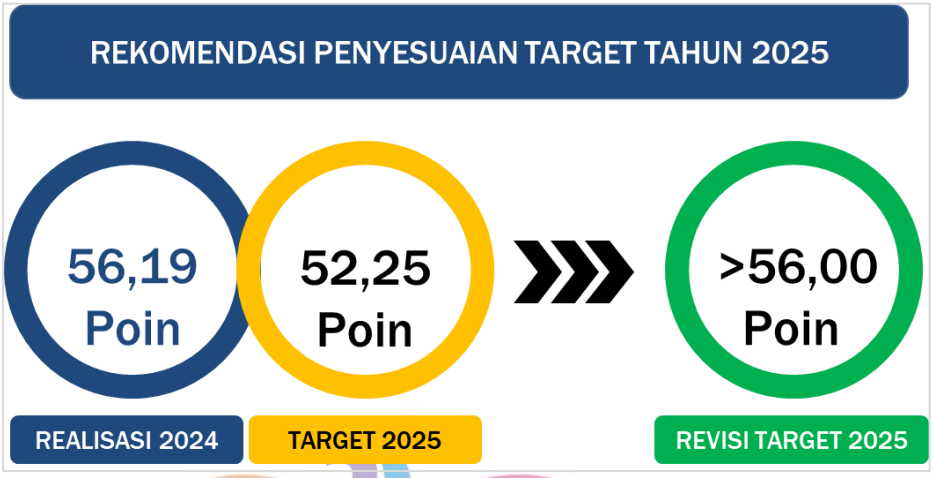


Gambar 3.5
Faktor Pendukung dan Permasalahan
Indeks Pembangunan Kebudayaan

Dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan, diperlukan strategi yang terarah dan terukur sesuai dengan visi pembangunan kebudayaan daerah. Oleh karena itu, perubahan target dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 menjadi langkah penting dalam memastikan efektivitas program dan kebijakan yang diimplementasikan.

Perubahan target Renstra 2025 mencerminkan penyesuaian terhadap kondisi aktual, kebutuhan masyarakat, serta tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kebudayaan. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan pembangunan kebudayaan di Kabupaten Bandung dapat lebih optimal dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berikut adalah gambaran perubahan target Renstra Tahun 2025 yang mencakup berbagai aspek strategis dalam pembangunan kebudayaan:



Gambar 3.6
Rekomendasi Target Renstra Indeks Pembangunan Kebudayaan

b. Indeks Pengembangan Kepariwisataan

Indikator kedua yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sektor pariwisata adalah Indeks Pembangunan Kepariwisataan, yang bertujuan untuk mengukur tingkat perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bandung. Target yang ditetapkan dalam Renstra tahun 2024 adalah peningkatan persentase sebesar 5% dalam sektor pariwisata.

Untuk mencapai target tersebut, diperlukan berbagai upaya strategis, seperti penguatan promosi destinasi wisata, peningkatan kualitas layanan pariwisata, pengembangan infrastruktur pendukung, serta pemberdayaan masyarakat dalam sektor ekonomi kreatif berbasis pariwisata. Selain itu, kolaborasi dengan pelaku industri pariwisata, peningkatan event wisata lokal, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital juga menjadi langkah penting guna mendorong pertumbuhan sektor ini secara berkelanjutan.

Dengan adanya perubahan strategi dalam Renstra Tahun 2025, diharapkan pertumbuhan sektor pariwisata dapat semakin pesat, memberikan dampak ekonomi positif, serta meningkatkan daya saing Kabupaten Bandung sebagai destinasi wisata unggulan.

1) Capaian Kinerja Indeks Pengembangan Kepariwisataan

Capaian kinerja dalam sektor pariwisata Kabupaten Bandung menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas program dan kebijakan yang telah diterapkan. Selama periode berjalan, capaian kinerja menunjukkan perkembangan positif dalam berbagai aspek, termasuk peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, pertumbuhan usaha pariwisata, serta peningkatan Indeks Pembangunan Kepariwisataan.

Keberhasilan ini tidak lepas dari berbagai strategi yang telah diterapkan, seperti peningkatan promosi destinasi wisata, penguatan infrastruktur, serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang masih perlu diatasi, seperti peningkatan kualitas layanan wisata, pengelolaan daya tarik wisata yang lebih optimal, serta penguatan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri pariwisata.

Dengan adanya evaluasi terhadap capaian kinerja, langkah strategis ke depan dapat lebih terarah, terutama dalam mendukung perubahan target Renstra Tahun 2025 yang berfokus pada peningkatan daya saing dan keberlanjutan sektor pariwisata di Kabupaten Bandung.

Dalam menentukan capaian target tesebut ada hitungan yang harus disesuaiakan yaitu dengan rumus “Peningkatan Jumlah kunjungan wisatawan + Peningkatan rata-rata belanja wisatawan + Peningkatan rata -rata tinggal wisatawan dibagi 3 dikali 100%. Atau dapat dilihat sebagai berikut;

$$= \frac{\begin{array}{c}\boldsymbol{Peningkatan\ Jumlah\ kunjungan\ wisatawan\ +} \\ \boldsymbol{Peningkatan\ rata2\ belanja\ wisatawan\ +} \\ \boldsymbol{Peningkatan\ rata\ rata\ tinggal\ wisatawan}\end{array}}{\boldsymbol{3}}\ \boldsymbol{x\ 100\%}$$

Rumus tersebut digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan sektor pariwisata secara kuantitatif, dengan mempertimbangkan tiga aspek utama yang berkontribusi terhadap pertumbuhan industri pariwisata, yaitu jumlah kunjungan wisatawan, rata-rata belanja wisatawan, dan rata-rata lama tinggal wisatawan.

Dengan menerapkan perhitungan ini, pemerintah daerah dapat mengevaluasi efektivitas program dan kebijakan yang telah dijalankan, serta menyesuaikan strategi dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Sebagai contoh, jika terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah kunjungan wisatawan, tetapi rata-rata belanja dan lama tinggal wisatawan tidak mengalami peningkatan yang berarti, maka strategi yang lebih berfokus pada pengembangan atraksi wisata, peningkatan fasilitas, serta promosi paket wisata yang menarik perlu diprioritaskan.



Gambar 3.7
Capaian Target Indeks Pengembangan Kepariwisataan

2) Perbandingan Capaian Indeks Pengembangan Kepariwisataan dengan Tahun sebelumnya

Dalam mengevaluasi perkembangan sektor pariwisata, perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya menjadi salah satu indikator utama. Data ini memberikan gambaran mengenai tren pertumbuhan dan efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Jika terjadi peningkatan, maka strategi yang telah diterapkan dapat dikembangkan lebih lanjut, sedangkan jika terjadi penurunan, diperlukan langkah-langkah korektif untuk memperbaiki sektor yang masih lemah.

Berdasarkan analisis perbandingan dengan tahun sebelumnya, peningkatan capaian kinerja sektor pariwisata dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti bertambahnya jumlah wisatawan yang berkunjung, peningkatan investasi dalam infrastruktur wisata, serta efektivitas strategi pemasaran dan promosi destinasi wisata. Jika

dibandingkan dengan tahun lalu, sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan umumnya didukung oleh inovasi dalam layanan pariwisata, penguatan ekosistem digital, serta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan pelaku industri pariwisata.

Sebaliknya, jika capaian kinerja menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, maka faktor-faktor yang berkontribusi perlu dianalisis lebih dalam. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti berkurangnya daya beli masyarakat, kebijakan pembatasan perjalanan, kurangnya diversifikasi destinasi wisata, atau belum optimalnya pengelolaan daya tarik wisata. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global dan perubahan pola preferensi wisatawan juga dapat berdampak pada turunnya angka kunjungan dan tingkat hunian akomodasi.

Dengan adanya perbandingan ini, pemangku kebijakan dapat mengidentifikasi aspek mana yang perlu diperkuat serta strategi apa yang perlu disesuaikan untuk mencapai target pertumbuhan sektor pariwisata yang lebih baik di tahun mendatang. Evaluasi berbasis data dan pemantauan tren secara berkelanjutan menjadi kunci dalam memastikan bahwa pengembangan sektor pariwisata tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berikut gambar perbandingan capaian dengan tahun lalu;



Gambar 3.8
Perbandingan Capaian Indeks Pengembangan Kepariwisataan dengan tahun sebelumnya

3) Perbandingan Capaian Indeks Pengembangan Kepariwisataan dengan Resntra DISBUDPAR

Evaluasi kinerja sektor pariwisata juga dilakukan dengan membandingkan capaian aktual dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR). Jika capaian kinerja masih berada di bawah target,

maka diperlukan penyesuaian kebijakan, optimalisasi program promosi, serta peningkatan fasilitas pendukung guna mendukung pertumbuhan sektor pariwisata.

Melalui perbandingan ini, dapat diketahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program serta faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian target. Jika capaian kinerja masih berada di bawah target, maka diperlukan langkah-langkah strategis, seperti penyesuaian kebijakan, optimalisasi program promosi, serta peningkatan fasilitas pendukung guna mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. Selain itu, analisis terhadap kendala yang dihadapi juga menjadi aspek krusial dalam merumuskan solusi yang efektif. Berikut gambar perbandingan realisasi dengan Renstra;



Gambar 3.9
Perbandingan Capaian Indeks Pengembangan Kepariwisataan dengan tahun sebelumnya

4) Perbandingan capaian kinerja dengan target Nasional

Secara nasional, sektor pariwisata Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Kabupaten Bandung, dengan berbagai potensi wisata yang dimilikinya, berkontribusi positif terhadap pencapaian target nasional tersebut. Namun, untuk meningkatkan daya saing dan kontribusi yang lebih besar, diperlukan upaya peningkatan kualitas layanan, promosi yang lebih gencar, dan pengembangan destinasi wisata baru.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat setempat menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan. Penyediaan infrastruktur yang memadai, seperti akses transportasi yang lebih baik, fasilitas pendukung wisata, serta pengelolaan lingkungan yang berorientasi pada pariwisata ramah lingkungan, menjadi aspek penting yang harus terus ditingkatkan.

Di sisi lain, digitalisasi sektor pariwisata juga perlu diperkuat melalui pemanfaatan teknologi dalam promosi dan pelayanan wisata. Penggunaan platform digital, media sosial, serta aplikasi berbasis teknologi dapat membantu menarik lebih banyak wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, sekaligus memberikan pengalaman wisata yang lebih interaktif dan informatif.

Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan Kabupaten Bandung dapat meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan sektor pariwisata nasional serta memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi unggulan di Indonesia. Berikut Tabel perbandingan Indeks Pengembangan Kepariwisataan;

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2024	Target Standar Nasional	%
Presentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	12,77%	N/A	-

Tabel 3.4
Tabel Perbandingan Indeks Pengembangan Kepariwisataan dengan Target Nasional

c. Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif

Capaian kinerja akan dilihat dari seberapa besar kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD), jumlah kunjungan wisatawan, serta kualitas destinasi wisata yang ada. Ini juga akan mencakup pengembangan destinasi baru, peningkatan kualitas infrastruktur, serta keberlanjutan pengelolaan objek wisata yang ada.

Capaian kinerja akan dilihat dari seberapa besar kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD), jumlah kunjungan wisatawan, serta kualitas destinasi wisata yang ada. Ini juga akan

mencakup pengembangan destinasi baru, peningkatan kualitas infrastruktur, serta keberlanjutan pengelolaan objek wisata yang ada.

Selain itu, peningkatan promosi wisata melalui media digital, kerja sama dengan pelaku industri pariwisata, serta inovasi dalam layanan wisata menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan sektor ini. Evaluasi juga dilakukan dengan membandingkan capaian aktual terhadap target yang telah ditetapkan dalam kebijakan daerah maupun nasional. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih signifikan bagi masyarakat setempat. Berikut capaian pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif. Berikut gambar presentase pertumbuhan pertumbuhan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif;



Gambar 3.10
Perbandingan Capaian Indeks Pengembangan Kepariwisataan dengan tahun sebelumnya

Capaian kinerja sektor pariwisata menunjukkan hasil yang positif, dengan realisasi mencapai 160% dari target Renstra, di mana target yang ditetapkan sebesar 1%, sementara realisasi yang dicapai adalah 1,60%. Hal ini mencerminkan efektivitas strategi yang telah diterapkan, termasuk optimalisasi promosi, peningkatan kualitas layanan wisata, serta penguatan infrastruktur pendukung.

Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa sektor pariwisata memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Namun, agar pertumbuhan ini berkelanjutan, diperlukan inovasi dalam pengelolaan destinasi wisata, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal.

2. Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tujuan kedua yang tidak kalah penting dalam pengukuran kinerja adalah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung. Tanpa peningkatan kualitas SDM, sulit bagi suatu instansi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Peningkatan kapasitas aparatur ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan program-program yang telah disusun.

Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur juga berperan dalam meningkatkan efektivitas koordinasi antar-stakeholder, baik dengan sektor swasta, komunitas lokal, maupun lembaga pemerintah lainnya. Dengan adanya peningkatan kompetensi, diharapkan aparatur mampu merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, menyusun strategi promosi wisata yang lebih inovatif, serta mengelola anggaran secara lebih efisien dan transparan.

Berdasarkan analisis berbagai sumber, keberhasilan dalam meningkatkan kapasitas aparatur tidak hanya bergantung pada pelatihan formal, tetapi juga pada pengalaman langsung di lapangan, benchmarking dengan daerah lain, serta pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pariwisata. Dengan demikian, peningkatan kapasitas SDM menjadi aspek fundamental dalam membangun ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Beberapa indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan ini adalah sebagai berikut

a. Nilai LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1) Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi Nilai Akuntabilitas Kinerja yang diperoleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung, nilai yang dicapai sebesar **81,10 Poin**, yang masuk dalam **Kategori A**

dengan interpretasi memuaskan. Capaian ini mencerminkan tingkat akuntabilitas yang baik dalam aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Nilai ini menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola kinerja di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sudah berjalan dengan baik, dengan adanya sistem perencanaan yang jelas, pengukuran kinerja yang transparan, serta pelaporan yang akurat dan akuntabel. Ke depan, peningkatan nilai akuntabilitas dapat dilakukan melalui optimalisasi strategi perencanaan berbasis data, penguatan sistem evaluasi kinerja secara berkelanjutan, serta peningkatan sinergi antara seluruh elemen yang terlibat dalam pengelolaan kinerja instansi.



Gambar 3.11
Gambar Capaian Nilai LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

b. Persentase Aset Dalam Kondisi Baik

Aset yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran operasional serta pelayanan kepada masyarakat dan wisatawan. Persentase aset dalam kondisi baik menunjukkan tingkat kesiapan serta kualitas infrastruktur yang dapat digunakan secara optimal dalam mendukung sektor pariwisata.

Evaluasi kondisi aset dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia tetap berfungsi dengan baik dan sesuai standar. Beberapa indikator yang digunakan dalam penilaian ini mencakup kelayakan fisik bangunan, kelengkapan fasilitas pendukung, serta efisiensi dalam pemanfaatannya. Semakin tinggi

persentase aset yang berada dalam kondisi baik, semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan kualitas layanan dan kenyamanan bagi wisatawan.

Selain itu, pemeliharaan dan perawatan aset menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan fungsinya. Dengan adanya pencatatan yang sistematis dan pengelolaan aset yang terstruktur, diharapkan aset yang dimiliki dapat digunakan secara maksimal dalam jangka waktu yang lebih lama. Berikut gambar capaian target pada asset dalam kondisi baik:



Gambar 3.12
Capaian Aset dalam Kondisi Baik

Melalui pengelolaan aset yang baik, efisiensi dalam penggunaan fasilitas dapat ditingkatkan, sehingga mendukung kelancaran operasional serta pelayanan di sektor kebudayaan dan pariwisata. Selain itu, evaluasi berkala terhadap kondisi aset juga menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap aset tetap dalam kondisi optimal dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan.

Dengan manajemen aset yang tepat, potensi aset dapat dimanfaatkan secara maksimal guna mendukung berbagai program dan kegiatan di sektor kebudayaan dan pariwisata. Melalui pengelolaan aset yang baik, efisiensi dalam penggunaan fasilitas dapat ditingkatkan, sehingga mendukung kelancaran operasional serta pelayanan di sektor kebudayaan dan pariwisata. Selain itu,

evaluasi berkala terhadap kondisi aset juga menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap aset tetap dalam kondisi optimal dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan capaian target terkait aset dalam kondisi baik, yang menjadi indikator penting dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarana pendukung:

NO	JENIS ASET	TOTAL	KONDISI		% KONDISI BAIK	% KONDISI RUSAK
			BAIK	RUSAK		
1	KIB A (TANAH)	Rp 15.610.102.724	Rp 15.610.102.724		100,0%	0,0%
2	KIB B (PERALATAN MESIN)	Rp 16.258.326.374	Rp 15.858.326.374	Rp 400.000.000	97,5%	2,5%
3	KIB C (GEDUNG DAN BANGUNAN)	Rp 133.052.590.637	Rp 123.510.590.637	Rp 9.542.000.000	92,8%	7,2%
4	KIB D (JARINGAN IRIGASI DAN JALAN)	Rp 784.612.016	Rp 663.508.818	Rp 121.103.198	84,6%	15,4%
5	KIB E (ASET TETAP LAIN)	Rp 3.613.430.782	Rp 2.094.559.328	Rp 1.518.871.454	58,0%	42,0%
6	KIB F (KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN)	Rp 445.092.350	Rp 445.092.350		100,0%	0,0%
		Rp 169.764.154.883	Rp 158.182.180.231	Rp 11.581.974.652	**93,2%**	**6,8%**

Tabel 3.5
Kondisi Aset Tahun 2024

B. CAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANDUNG

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Bandung selaku pengemban amanah masyarakat di bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaksanakan kewajibannya untuk menginformasikan tingkat akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Capaian Kinerja.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas

melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, RKPD Tahun 2024, Renstra DISBUDPAR Tahun 2021-2026, Renja DISBUDPAR Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement)*.

1. **Meningkatnya kualitas pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan di kabupaten bandung**

   Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang pertama adalah meningkatkan kualitas kebudayaan, ekonomi kreatif, dan pariwisata di Kabupaten Bandung. Hal ini menjadikan Kabupaten Bandung sebagai destinasi unggulan yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga mengintegrasikan kekayaan budaya lokal serta potensi ekonomi kreatif yang berkembang pesat. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi sektor pariwisata dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan, serta menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan pariwisata dan kebudayaan. Peningkatan kualitas ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah, memperkenalkan keanekaragaman budaya, dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi wisatawan.

Untuk mendukung sasaran tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung menetapkan sejumlah indikator kinerja yang menjadi tolok ukur dalam pencapaian tujuan. Indikator-indikator tersebut antara lain:

a. *Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan*: Mengukur seberapa besar daya tarik destinasi wisata Kabupaten Bandung bagi wisatawan domestik maupun internasional.
b. *Persentase Peningkatan Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan*: Menilai keberhasilan dalam menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi wisatawan, sehingga mendorong mereka untuk menghabiskan lebih banyak waktu di Kabupaten Bandung.
c. *Persentase Peningkatan Rata-rata Belanja Wisatawan*: Menggambarkan sejauh mana pariwisata dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian lokal, khususnya dalam sektor konsumsi oleh wisatawan.
d. *Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan*: Mengukur keberhasilan dalam pelestarian objek kebudayaan yang menjadi bagian penting dari daya tarik wisata, seperti cagar budaya, seni tradisional, dan warisan budaya lainnya.
e. *Peningkatan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif*: Mencerminkan keberhasilan dalam mengembangkan ekonomi kreatif yang berfokus pada produk-produk budaya dan seni yang dapat mendukung pariwisata serta menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Melalui indikator-indikator ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program yang telah dilaksanakan, serta melakukan perbaikan berkelanjutan untuk mencapai hasil yang optimal. Pencapaian yang baik dalam indikator-indikator ini akan mencerminkan sinergi antara sektor kebudayaan, ekonomi kreatif, dan pariwisata, serta berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah dan pelestarian budaya yang ada.

a. Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana daya tarik destinasi wisata Kabupaten Bandung dalam menarik wisatawan, baik domestik maupun internasional. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan merupakan salah satu indikator penting dalam mencerminkan efektivitas promosi pariwisata dan pengelolaan destinasi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung. Adapun rumus untuk menghitung Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan adalah sebagai berikut:

$$= \frac{(\boldsymbol{Jumlah\ Kunjungan\ wisatawan\ tahun\ N})}{(\boldsymbol{Jumlah\ Kunjungan\ wisatawan\ tahun\ N-1})}\ \boldsymbol{x\ 100\%}$$

1) Capaian Presentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Tahun 2024

Pada tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bandung tercatat sebanyak **7.716.767 wisatawan**, mengalami peningkatan sebesar **9.55%** dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu **7.044.300 wisatwan.** Presentase Peningkatan Jumlah Wisatawan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 3.13
Presentase Peningkatan Jumlah Wisatawan tahun 2024

Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan dalam menarik lebih banyak wisatawan, baik melalui program promosi, peningkatan fasilitas wisata, maupun pengembangan destinasi baru yang semakin diminati.

2) Perbandingan Peningkatan Presentase Kunjungan Wisatawan Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan kinerja, berikut ini dilakukan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun ini dengan tahun sebelumnya. Perbandingan ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pencapaian yang telah diraih dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan atau penurunan kinerja.

Dengan melihat tren perubahan antara kedua tahun tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai efektivitas program dan kebijakan yang telah dilaksanakan, serta menjadi dasar untuk perbaikan dan pengambilan kebijakan strategis di masa yang akan datang. perbandingan capaian antara tahun lalu dan tahun ini adalah sebagai berikut:



Gambar 3.14
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Dari segi realisasi, kunjungan wisatawan meningkat sebesar **672.467 wisatawan** dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 tercapai **7.044.300 wisatawan** dan tahun 2024 sebesar **7.716.767 wisatwawan**. Adapun dari aspek Capaian kinerja tahun 2023 sebesar 6% dan pada tahun 2024 sebesar 9.55%.

3) Perbandingan Peningkatan Presentase Kunjungan Wisatawan Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

Berdasarkan gambar di samping, dilihat dari persfektif perencanaan Jangka menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung tahun 2024 telah melampaui atau melebihi target akhir dari target RENSTRA yang telah ditetapkan yaitu sebesar **5%** dan 2024 telah terealisasi sebesar **9.55**%.



Gambar 3.15
Perbandingan Realisasi Kinerja
dengan Rata-rata Nasional

4) Perbandingan Peningkatan Presentase Kunjungan Wisatawan Tahun 2024 dengan Rata-Rata Nasional

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2024	Target Standar Nasional	%
Presentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	9,55%	N/A	-

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Rata-rata Nasional

Pada tingkat Kabupaten/Kota, Presentase Peningkatan Jumlah Wisatawan Kabupaten Bandung tahun 2024 berada di atas rata-rata Kabupaten Bandung dibandingkan dengan tahun 2023 tercapai 6% dan tahun ini mengalami kenaikan sebesar 9.55%.

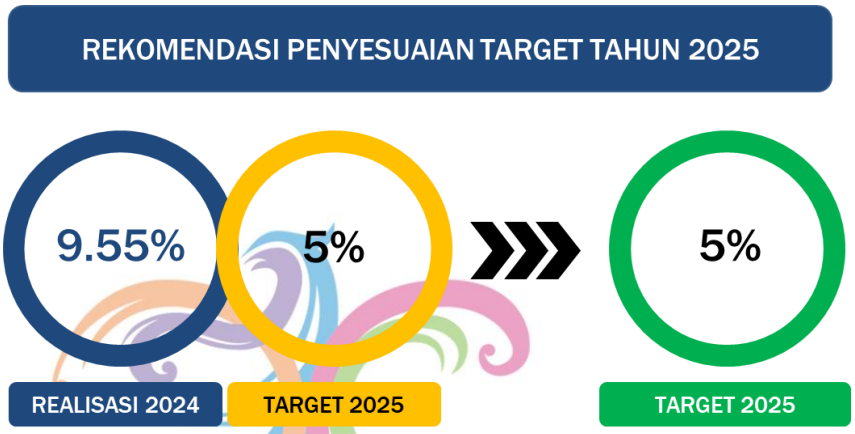
5) Faktor- faktor yang Menyebabkan Keberhasilan Pencapaian Presentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.16
Faktor yang Menyebabkan Keberhasilan Capaian Presentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan

Keberhasilan pencapaian persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Bandung dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling mendukung. Salah satu faktor utama adalah strategi promosi dan pemasaran destinasi wisata yang efektif. Melalui promosi yang intensif di berbagai saluran, seperti media sosial, iklan digital, dan kerja sama dengan agen perjalanan, Kabupaten Bandung dapat menarik perhatian wisatawan domestik maupun internasional. Selain itu, penyelenggaraan event dan festival yang berkaitan dengan budaya dan kuliner juga berperan penting dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

Untuk mengakselerasi kinerja persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Bandung pada tahun 2025, maka perlu penyesuaian target semula 5% masih cukup relevan jika melihat laju presentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang belum terlalu tinggi oleh karenanya untuk tahun 2025 masih menggunakan target pada Renstra sebelumnya dan dapat dilihat dari gambar sebagai berikut:



Gambar 3.17
Rekomendasi Penyesuaian Target tahun 2025
Presentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan

b. Persentase peningkatan Rata - rata Lama Tinggal Wisatawan

Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam tren perjalanan, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti peningkatan fasilitas, daya tarik destinasi, serta kebijakan pemerintah yang mendukung sektor pariwisata.

Persentase capaian peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan yang menjadi indicator Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung dapat dihitung dengan membandingkan data rata-rata lama tinggal pada tahun N dengan tahun N-1 dikali 100%. Perhitungan ini akan menunjukkan sejauh mana kebijakan dan program yang diterapkan berhasil meningkatkan durasi kunjungan wisatawan. Rumus penghitungan peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan adalah sebagai berikut:

$$= \frac{(Jumlah\ Rata - rata\ tinggal\ wisatawan\ tahun\ N)}{(Jumlah\ Rata - rata\ tinggal\ wisatawan\ tahun\ N-1)}\ x\ 100\%$$

1) Capaian Presentase Peningkatan Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan tahun 2024

Capaian peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan tahun 2024 adalah sebesar **14,5%** dengan realisasi rata-rata lama tinggal wisatawan di Kabupaten Bandung yaitu **1.58 Hari**. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya rata-rata lama tinggal wisatawan pada 2023 rata-rata lama tinggal wisatawan yaitu **1.38 Hari** perhitungan yang dilakukan berdasarkan rumus = (Jumlah Rata-rata tinggal wisatawan tahun 2024) / (Jumlah Rata-rata tinggal wisatawan tahun N-1) x 100%, berikut gambar capaian pada tahun 2024:



Gambar 3.18
Capaian Presentase Peningkatan
Rata-rata Lama Tinggal wisatawan

2) Perbandingan Presentase peningkatan Rata-rata Lama Tinggal tahun 2024 dengan tahun 2023

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tren perubahan dalam sektor pariwisata, penting untuk membandingkan peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan antara tahun 2024 dengan tahun 2023. Perbandingan ini akan memberikan wawasan tentang sejauh mana kebijakan dan program yang diterapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung berhasil meningkatkan durasi kunjungan wisatawan, serta dampaknya terhadap industri pariwisata secara keseluruhan**.**

Sebagai gambaran lebih jelas mengenai capaian tersebut, berikut ini disajikan perbandingan peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan antara tahun 2024 dan tahun 2023. Grafik berikut akan memperlihatkan perbandingan dan menunjukkan perubahan signifikan yang terjadi sebagai berikut:



Gambar 3.19
Perbandingan Presentase peningkatan Rata-rata Lama Tinggal Tahun 2024 dengan tahun Sebelumnya

3) Perbandingan Presentase peningkatan Rata-rata Lama Tinggal tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

Untuk mengevaluasi sejauh mana capaian yang telah diraih, berikut ini akan dibandingkan peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan tahun 2024 dengan target akhir Renstra. Perbandingan ini bertujuan untuk menilai apakah hasil yang tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung, serta untuk mengidentifikasi potensi perbaikan yang perlu dilakukan ke depannya.



Gambar 3.20
Perbandingan peningkatan Rata-rata Lama Tinggal Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

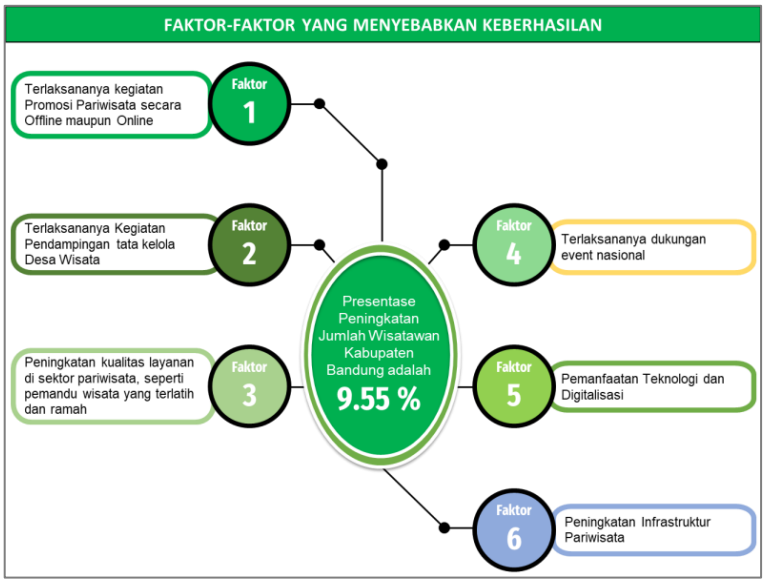
4) **Perbandingan Presentase Peningkatan Rata-rata Lama Tinggal tahun 2024 dengan Target Rata-rata Nasional**

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2024	Target Standar Nasional	%
Presentase Peningkatan Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	**14.5%**	N/A	-

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Rata-rata Nasional

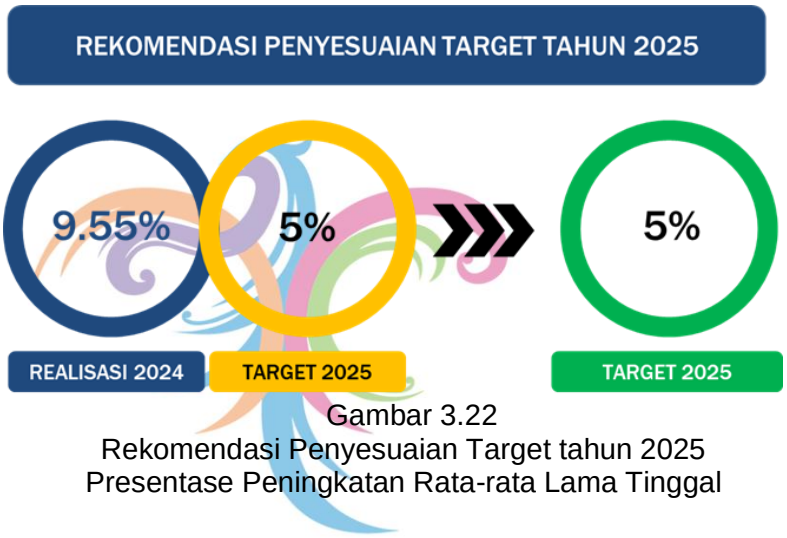
Berdasarkan data nasional yang bersumber dari website Kemenparekraf, rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara (wisman) di Indonesia pada tahun 2024 mengalami fluktuasi. Pada bulan Januari, rata-rata lama tinggal wisman tercatat sebesar **7,92** malam. Namun, pada bulan November, angka tersebut menurun menjadi **6,85** malam, dan kembali turun menjadi **6,98** malam pada bulan Desember. Data ini menunjukkan bahwa durasi tinggal wisman di Indonesia mengalami penurunan sepanjang tahun 2024.

5) **Faktor- faktor yang Menyebabkan Keberhasilan Pencapaian Presentase Peningkatan Rata-rata Lama Tinggal dapat dilihat pada gambar berikut:**



Gambar 3.21
Faktor yang Menyebabkan Keberhasilan Capaian Presentase Peningkatan Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan

Keberhasilan pencapaian persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan di Kabupaten Bandung sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling mendukung. Salah satu faktor utama adalah peningkatan kualitas pengalaman wisatawan, yang mencakup pengembangan destinasi wisata yang menarik serta peningkatan fasilitas pendukung seperti akomodasi, kuliner, dan aktivitas wisata. Promosi yang efektif dan penyelenggaraan acara-acara menarik juga berperan penting dalam memperpanjang durasi kunjungan wisatawan.



Gambar 3.22
Rekomendasi Penyesuaian Target tahun 2025
Presentase Peningkatan Rata-rata Lama Tinggal

Untuk mendorong lebih jauh pencapaian persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan di Kabupaten Bandung pada tahun 2025, penyesuaian terhadap target sebelumnya perlu dilakukan. Meskipun target semula sebesar 5% sudah memberikan arah yang jelas, laju peningkatan yang masih belum terlalu tinggi menunjukkan bahwa target tersebut tetap relevan. Oleh karena itu, untuk tahun 2025, target yang ditetapkan dalam Renstra sebelumnya masih dapat dipertahankan, dengan harapan adanya peningkatan yang lebih signifikan. Capaian ini dapat dilihat lebih jelas melalui grafik diatas.

c. Persentase Peningkatan Rata-rata Belanja Wisatawan

Sebagai bagian dari evaluasi kinerja sektor pariwisata, penting untuk melihat persentase peningkatan rata-rata belanja wisatawan. Rata-rata belanja wisatawan merupakan salah satu indikator utama yang menggambarkan seberapa besar dampak ekonomi yang dihasilkan dari sektor pariwisata. Peningkatan belanja wisatawan tidak hanya

mencerminkan keberhasilan dalam menarik pengunjung, tetapi juga menunjukkan tingkat kepuasan wisatawan terhadap fasilitas, atraksi, dan pengalaman yang ditawarkan. Dalam konteks ini, faktor-faktor seperti peningkatan kualitas pelayanan, keberagaman produk wisata, serta promosi yang tepat sasaran dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan belanja wisatawan. Selanjutnya, akan dibahas persentase peningkatan rata-rata belanja wisatawan berdasarkan data tahun 2024.

Berikut rumus cara menghitung persentase peningkatan rata-rata belanja wisatawan:

$$= \frac{(\boldsymbol{Jumlah\ Rata-rata\ belanja\ wisatawan\ tahun\ N})}{(\boldsymbol{Jumlah\ Rata-rata\ belanja\ wisatawan\ tahun\ N-1})}\ \boldsymbol{x\ 100\%}$$

Perhitungan ini dilakukan dengan membandingkan rata-rata belanja wisatawan pada tahun N dengan tahun sebelumnya (tahun N-1) dikali 100%. Dengan rumus ini, kita dapat mengetahui seberapa besar perubahan yang terjadi dalam pengeluaran wisatawan, yang mencerminkan dampak dari kebijakan, promosi, atau pengembangan destinasi wisata yang dilakukan selama periode tersebut. Hasil perhitungan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai peningkatan atau penurunan belanja wisatawan dari tahun ke tahun.

1) Capaian Presentase Peningkatan Belanja Wisatawan

Capaian persentase peningkatan belanja wisatawan tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang positif, yang mengindikasikan bahwa para wisatawan semakin mengalokasikan anggaran mereka untuk berbagai aktivitas dan layanan yang ada di Kabupaten Bandung. Peningkatan ini menggambarkan keberhasilan program pengembangan destinasi wisata yang tidak hanya menarik pengunjung, tetapi juga mampu mendorong mereka untuk lebih banyak mengeluarkan dana, baik untuk akomodasi, kuliner, maupun oleh-oleh. Faktor-faktor seperti penyelenggaraan event-event khusus dan promosi yang efektif turut

mempengaruhi belanja wisatawan, mengenai capaian ini akan disajikan melalui grafik sebagai berikut.



Gambar 3.23
Capaian Presentase Peningkatan Belanja Wisatawan

2) Perbandingan Presentase peningkatan Rata-rata Lama Tinggal tahun 2024 dengan tahun 2023

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tren perubahan dalam sektor pariwisata, penting untuk membandingkan peningkatan rata-rata belanja wisatawan antara tahun 2024 dengan tahun 2023. Perbandingan ini akan memberikan wawasan tentang sejauh mana kebijakan dan program yang diterapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung berhasil meningkatkan pengeluaran wisatawan, serta dampaknya terhadap perekonomian dan keberlanjutan industri pariwisata secara keseluruhan.

Sebagai gambaran lebih jelas mengenai capaian tersebut, berikut ini disajikan perbandingan peningkatan rata-rata belanja wisatawan antara tahun 2024 dan tahun 2023. Grafik berikut akan memperlihatkan perbandingan dan menunjukkan perubahan signifikan yang terjadi sebagai berikut:



Gambar 3.24
Perbandingan Realisasi dan Capaian Peningkatan Rata-rata Belanja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Dari segi realisasi, kunjungan wisatawan mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, jumlah wisatawan tercatat pada angka tertentu, sementara pada tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup berarti.

Adapun dari aspek pencapaian kinerja, terjadi peningkatan yang signifikan pada indikator yang relevan, yang mencerminkan adanya perkembangan dalam sektor pariwisata. Perbandingan antara capaian tahun 2023 dan 2024 menunjukkan adanya peningkatan persentase yang jelas, yang mencerminkan hasil dari upaya pengembangan dan promosi pariwisata yang telah dilakukan.

3) Perbandingan Presentase peningkatan Rata-rata Lama Tinggal tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

Untuk mengevaluasi sejauh mana capaian yang telah diraih, berikut ini akan dibandingkan peningkatan rata-rata belanja wisatawan tahun 2024 dengan target akhir yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung. Perbandingan ini bertujuan untuk menilai apakah pencapaian yang ada sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta untuk mengukur efektivitas kebijakan dan program yang telah diterapkan. Selain itu, perbandingan ini juga akan memberikan gambaran mengenai potensi perbaikan yang masih dapat dilakukan untuk mencapai hasil yang lebih optimal di masa depan, guna mendorong perkembangan industri pariwisata yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari gambar sebagai berikut:



Gambar 3.25
Perbandingan peningkatan Rata-rata Belanja
Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

4) Perbandingan Presentase Peningkatan Rata-rata Lama Tinggal tahun 2024 dengan Target Rata-rata Nasional

Berdasarkan data nasional yang bersumber dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), sektor pariwisata Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan pada tahun 2024. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) antara Januari hingga November 2024 mencapai 12.658.048, meningkat 20,17 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023 bulan Desember 2024, Indonesia mencatatkan 1,24 juta kunjungan wisman, naik 13,95 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan 8,72 persen dibandingkan bulan yang sama tahun lalu. Peningkatan jumlah kunjungan ini berpotensi meningkatkan rata-rata belanja wisatawan di Indonesia meskipun data terkait belum dapat di akses, berikut Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Rata-rata Nasional:

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2024	Target Standar Nasional	%
Presentase Peningkatan Rata-rata Belanja Wisatawan	**6.85%**	N/A	-

Tabel 3.8
Perbandingan Rata-rata Belanja dengan Rata-rata Nasional

5) Faktor- faktor yang Menyebabkan Keberhasilan Pencapaian Presentase Peningkatan Rata-rata Belanja dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.26
Faktor yang Menyebabkan Keberhasilan Capaian Presentase Peningkatan Rata-rata Belanja Wisatawan

Keberhasilan pencapaian persentase peningkatan rata-rata belanja wisatawan di Kabupaten Bandung sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kualitas pelayanan yang diberikan oleh sektor pariwisata, keberagaman destinasi wisata yang tersedia, serta promosi yang efektif untuk menarik lebih banyak wisatawan. Selain itu, pengaruh kebijakan lokal yang mendukung sektor pariwisata, seperti penyediaan fasilitas yang memadai dan peningkatan infrastruktur, juga berperan penting dalam mendorong peningkatan belanja wisatawan. Faktor-faktor eksternal seperti tren pariwisata global dan kondisi ekonomi juga turut memengaruhi keputusan wisatawan dalam mengeluarkan pengeluaran lebih tinggi selama berkunjung.



Gambar 3.27
Rekomendasi Penyesuaian Target tahun 2025
Presentase Peningkatan Rata-rata Belanja Wisatawan

d. Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan

Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pembangunan kebudayaan berhasil dilaksanakan. Pembangunan kebudayaan mencakup berbagai aspek penting, salah satunya adalah kualitas objek pemajuan kebudayaan yang meliputi pengelolaan dan pelestarian sejarah, cagar budaya, serta museum sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Sasaran utama dalam pengembangan IPK adalah meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan objek-objek kebudayaan tersebut, yang tidak hanya berperan dalam melestarikan nilai

sejarah, tetapi juga berfungsi sebagai sumber daya untuk pendidikan, pariwisata, dan identitas budaya.

Dalam hal ini, persentase tersebut menunjukkan hubungan antara jumlah objek kebudayaan yang berhasil dilestarikan dengan jumlah objek yang telah teridentifikasi atau terdaftar untuk dilestarikan. Persentase ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Presentase\ Objek\ Pemajuan\ Kebudayaan\ yang\ dilestarikan = \frac{(Jumlah\ Borang\ Kesenian\ yang\ terlestarikan)}{(Jumlah\ Borang\ Kesenian\ yang\ terdata)}\ x\ 100\%$$

Dengan demikian, semakin tinggi persentase objek kebudayaan yang dilestarikan, semakin berhasil pula upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan yang dilakukan. Hal ini penting dalam mendukung keberlanjutan dan perkembangan kebudayaan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga warisan budaya untuk generasi mendatang. Presentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan di Kabupaten Bandung menunjukan kondisi yang lebih baik. Kondisi ini mengindikasikan keadaan yang semakin positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Bandung. Hal ini ditandai dengan pencapaian Presentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan pada tahun 2024 yang dengan capaian kinerja sebesar 100% yaitu dari target sebesar 5% dan terealisasi sebesar point.

1) Capaian Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelestarian kebudayaan, penting untuk melihat capaian persentase objek pemajuan kebudayaan yang berhasil dilestarikan pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan upaya dan komitmen yang telah dilakukan dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya, baik melalui program-program pelestarian yang telah dijalankan maupun dengan melibatkan masyarakat lokal dalam menjaga nilai-nilai budaya. Dengan melihat perbandingan ini, kita dapat mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang diterapkan efektif

dalam mempertahankan kekayaan budaya, serta untuk mengetahui area yang masih memerlukan perhatian lebih agar pelestarian kebudayaan dapat terus terjaga dan berkembang di masa depan.



Gambar 3.28
Capaian Presentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan

2) Perbandingan Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan Tahun 2024 dengan Tahun Lalu

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan pelestarian kebudayaan, berikut ini akan disajikan perbandingan persentase objek pemajuan kebudayaan yang berhasil dilestarikan antara tahun 2024 dengan tahun sebelumnya. Perbandingan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana program-program pelestarian yang telah dilaksanakan memberikan dampak yang positif, serta untuk mengevaluasi apakah ada kemajuan yang signifikan dalam upaya melestarikan objek-objek kebudayaan yang ada di Kabupaten Bandung. Selain itu, perbandingan ini juga akan membantu mengidentifikasi area yang masih memerlukan perhatian lebih guna memastikan kelestarian warisan budaya di masa depan.



Gambar 3.29
Perbandingan Presentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

3) Perbandingan Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan Tahun 2024 dengan Target Renstra

Untuk mengevaluasi sejauh mana pencapaian pelestarian kebudayaan yang telah diraih, berikut ini akan disajikan perbandingan persentase objek pemajuan kebudayaan yang berhasil dilestarikan pada tahun 2024 dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Perbandingan ini bertujuan untuk menilai apakah hasil yang tercapai sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, serta untuk mengukur efektivitas program dan kebijakan pelestarian kebudayaan yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, dapat diidentifikasi apakah ada kesenjangan antara pencapaian aktual dan target yang diharapkan, serta area yang perlu ditingkatkan guna mencapai hasil yang lebih optimal di masa mendatang. Berikut graphic capaian dan target dibandingkan dengan target Renstra



Gambar 3.30
Perbandingan Presentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan tahun 2024 dengan Target Renstra

4) Perbandingan Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan Tahun 2024 dengan Target Nasional

Untuk mengevaluasi efektivitas program pelestarian kebudayaan di Kabupaten Bandung, penting untuk membandingkan persentase objek pemajuan kebudayaan yang berhasil dilestarikan pada tahun 2024 dengan target nasional yang telah ditetapkan, Terutama setelah ditetapkannya Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK) 2025-2045. RIPK ini, yang ditandatangani pada Oktober 2024, menekankan pentingnya pengembangan kebudayaan sebagai penguatan identitas nasional dan kontribusi Indonesia di tingkat global. Dengan demikian, evaluasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih untuk mencapai target nasional dalam pelestarian kebudayaan. Berikut tabel Perbandingan dengan target nasional:

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2024	Target Standar Nasional	%
Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	55%	N/A	-

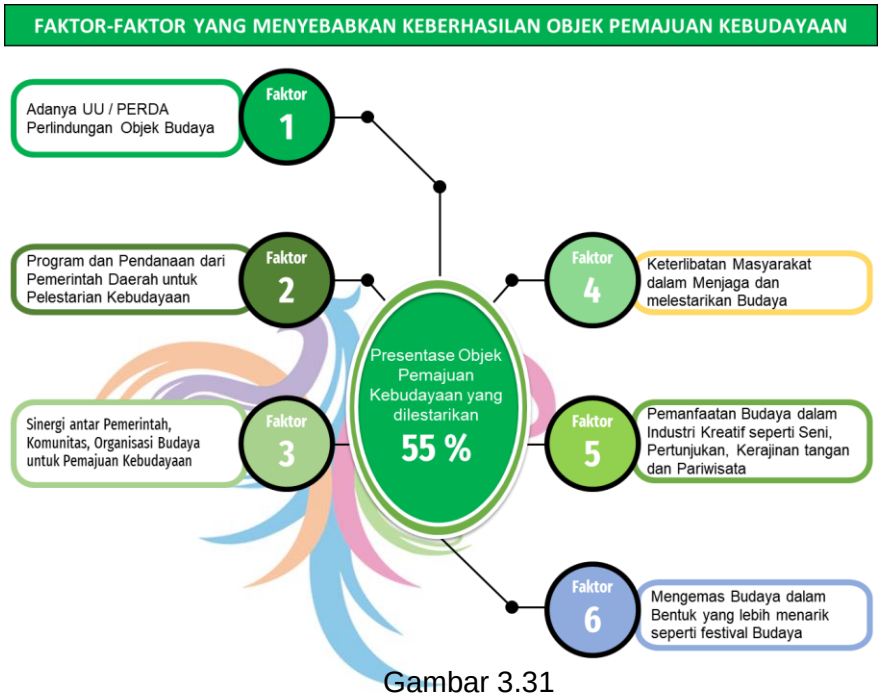
Tabel 3.9
Perbandingan Rata-rata Belanja dengan Rata-rata Nasional

5) Faktor-faktor yang Mendukung Keberhasilan peningkatan Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan Tahun 2024

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan pada tahun 2024 melibatkan berbagai aspek penting, baik dari segi kebijakan, dukungan masyarakat, maupun keberlanjutan program pelestarian itu sendiri. Selain faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, beberapa faktor yang mendukung keberhasilan persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan pada tahun 2024 lebih berfokus pada program-program pelestarian kebudayaan yang telah dijalankan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pencapaian tersebut, berikut ini akan disajikan grafik yang

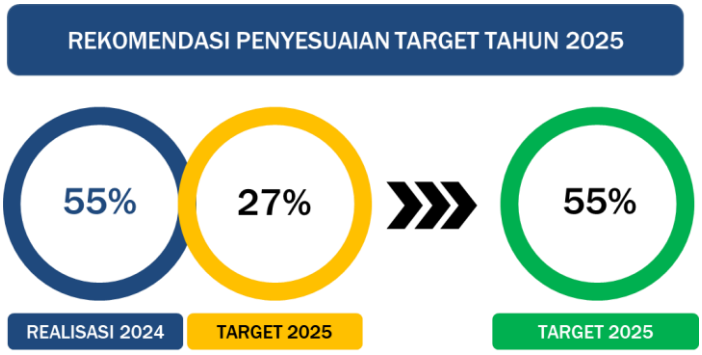
menggambarkan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan pada tahun 2024. Grafik ini akan memberikan ilustrasi visual mengenai kontribusi berbagai program dan upaya yang telah dilakukan, serta memberikan insight terkait dampak dari program-program pelestarian yang diterapkan.



Gambar 3.31
Faktor penyebab keberhasilan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan tahun 2024

Untuk mendorong lebih jauh pencapaian persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan di Kabupaten Bandung pada tahun 2025, penyesuaian terhadap target sebelumnya perlu dilakukan. Meskipun target semula sebesar 27% sudah memberikan arah yang jelas, realisasi yang telah mencapai 55% menunjukkan pencapaian yang lebih tinggi dari yang diharapkan. Oleh karena itu, untuk tahun 2025, target yang ditetapkan dalam Renstra sebelumnya dapat direvisi, dengan harapan dapat

mencapai hasil yang lebih optimal. Capaian ini dapat dilihat lebih jelas melalui grafik di bawah.



Gambar 3.32
Rekomendasi Penyesuaian Target Tahun 2025

e. Peningkatan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif

Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan sektor ekonomi kreatif, berikut ini akan disajikan data terkait peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Bandung pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam sektor yang memiliki potensi besar untuk perekonomian daerah.

Sebelum memasuki grafik, berikut adalah cara penghitungan capaian peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Bandung Untuk menghitung capaian peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Bandung, digunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{(Jumlah\ pelaku\ ekonomi\ kreatif\ \ tahun\ N)}{(Jumlah\ pelaku\ ekonomi\ kreatif\ \ tahun\ N-1)}\ x\ 100\%$$

Rumus ini digunakan untuk mengukur persentase pertumbuhan jumlah pelaku ekonomi kreatif dari tahun sebelumnya. Dengan cara ini, kita dapat mengetahui sejauh mana sektor ekonomi kreatif berkembang setiap tahunnya. Grafik berikut ini akan memperlihatkan secara jelas peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif berdasarkan perhitungan tersebut.

1) Capaian Peningkatan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai capaian peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Bandung, berikut ini akan disajikan data terkait perkembangan jumlah pelaku ekonomi kreatif dari tahun ke tahun. Dengan menggunakan rumus perhitungan capaian yang telah dijelaskan sebelumnya, kita dapat melihat sejauh mana sektor ekonomi kreatif telah berkembang. Grafik berikut ini akan menunjukkan secara visual capaian peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif berdasarkan perhitungan tersebut**.**



Gambar 3.33
Peningkatan Capaian Pelaku Ekonomi Kreatif

2) Perbandingan Capaian Peningkatan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif dengan Tahun Sebelumnya

Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan jumlah pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Bandung, berikut ini akan disajikan perbandingan capaian peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif antara tahun 2024 dan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, capaian peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif tercatat mencapai 60%, meskipun target yang ditetapkan hanya sebesar 2%. Sementara itu, pada tahun 2023, jumlah pelaku ekonomi kreatif tercatat sebanyak 4.694, dan pada tahun 2024

jumlahnya meningkat menjadi 7.549. Grafik berikut ini akan memperlihatkan secara visual perbandingan capaian tersebut.



Gambar 3.34
Peningkatan Capaian Pelaku Ekonomi Kreatif dengan tahun sebelumnya

3) Perbandingan Capaian Peningkatan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif dengan Target Renstra

Untuk mengevaluasi sejauh mana pencapaian sektor ekonomi kreatif, berikut ini akan disajikan perbandingan capaian peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Meskipun target yang ditetapkan dalam Renstra hanya sebesar 2%, capaian pada tahun 2024 berhasil mencapai 60%. Perbandingan ini akan memberikan gambaran mengenai sejauh mana program dan kebijakan yang diterapkan telah berhasil melampaui target yang diharapkan. Grafik berikut ini akan memperlihatkan perbandingan capaian tersebut secara lebih jelas.



Gambar 3.35
Peningkatan Capaian Pelaku Ekonomi Kreatif dengan Target Renstra

4) Perbandingan Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif dengan Target Nasional

Berdasarkan data nasional yang bersumber dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), sektor ekonomi kreatif di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan pada tahun 2024 meskipun tidak secara rinci besaran targetnya. Jumlah pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Bandung sendiri mengalami peningkatan sebesar 60% antara Januari hingga Desember 2024, jauh melampaui target renstra yang hanya sebesar 2%. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan ekosistem ekonomi kreatif yang pesat di wilayah tersebut. Meski demikian, data terkait kontribusi spesifik terhadap perekonomian daerah masih belum dapat diakses. Berikut Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Rata-rata Nasional. Berikut Tabel perbandingan Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif dengan Tatget Nasional

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2024	Target Standar Nasional	%
Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif	60%	N/A	-

Tabel 3.10
Perbandingan Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif dengan Target Nasional

5) Faktor-Faktor Penyebab Tercapainya Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang mendukung tercapainya peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Bandung, berikut ini akan disajikan penjelasan mengenai beberapa faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan tersebut. Faktor-faktor ini mencakup kebijakan yang mendukung, program-program pelatihan, serta partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif. Grafik berikut ini akan menunjukkan secara visual

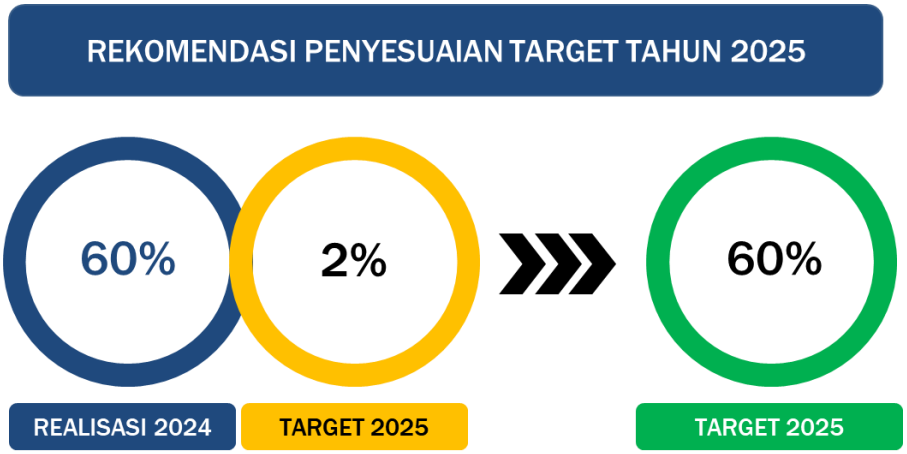
hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif**.**



Gambar 3.36
Factor Penyebab Peningkatan Capaian Pelaku Ekonomi Kreatif

Untuk mendorong lebih jauh pencapaian peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Bandung pada tahun 2025, penyesuaian terhadap target sebelumnya perlu dilakukan. Meskipun target semula sebesar 2% sudah memberikan arah yang jelas, realisasi yang telah mencapai 60% menunjukkan pencapaian yang lebih tinggi dari yang diharapkan. Oleh karena itu, untuk tahun 2025, target yang ditetapkan dalam Renstra sebelumnya dapat direvisi, dengan harapan dapat mencapai hasil yang lebih optimal.

Pencapaian yang telah diraih menunjukkan adanya pertumbuhan signifikan dalam sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Bandung. Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung, seperti peningkatan akses terhadap pelatihan, dukungan kebijakan pemerintah, serta keterlibatan aktif para pelaku usaha dalam mengembangkan inovasi mereka. Capaian ini dapat dilihat lebih jelas melalui grafik di bawah.



Gambar 3.37
Rekomendasi Penyesuaian Target Peningkatan Capaian
Pelaku Ekonomi Kreatif

Dengan adanya revisi target untuk tahun 2025, diharapkan kebijakan yang diterapkan semakin adaptif terhadap kebutuhan pelaku ekonomi kreatif. Langkah strategis seperti pemberian insentif, peningkatan akses pasar, dan penguatan ekosistem digital dapat menjadi kunci utama dalam menjaga momentum pertumbuhan ini. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat perlu terus ditingkatkan guna memastikan pencapaian yang lebih maksimal di masa mendatang.

2. Sasaran ke 2 (dua) Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur DISBUDPAR

Dalam mengukur keberhasilan peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur DISBUDPAR, terdapat dua indikator utama yang digunakan, Nilai LAKIP dan Persentase Aset dalam Kondisi Baik.

Indikator pertama, ***Nilai LAKIP*** **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata** menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung dalam mengelola program dan kebijakan. Target yang ditetapkan dalam Renstra adalah **81,00 poin**, sementara realisasi yang berhasil dicapai adalah 81,10 poin. Capaian ini mencerminkan kinerja yang telah memenuhi target

dengan interpretasi yang memuaskan, menunjukkan efektivitas dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja instansi.

Indikator kedua adalah ***Persentase Aset dalam Kondisi Baik***, yang mencerminkan sejauh mana infrastruktur dan sarana pendukung sektor kebudayaan dan pariwisata berada dalam kondisi optimal. Target yang ditetapkan adalah 93%, sementara capaian aktual mencapai **93,2%**, menunjukkan sedikit melampaui target yang telah direncanakan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemeliharaan dan pengelolaan aset telah berjalan dengan baik, sehingga dapat mendukung kelancaran operasional serta pelayanan publik di sektor kebudayaan dan pariwisata.

Keberhasilan dalam kedua indikator ini mencerminkan komitmen DISBUDPAR dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta optimalisasi aset guna menunjang pertumbuhan sektor kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Bandung.

C. PRESTASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Bandung terus berupaya dalam pelestarian budaya dan pengembangan sektor pariwisata. Berbagai pencapaian telah diraih sebagai bukti komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan, pengelolaan destinasi wisata, serta pelestarian warisan budaya. Berikut ini adalah beberapa prestasi yang berhasil diraih:

Sederet penghargaan dan pencapaian ini mencerminkan keberhasilan DISBUDPAR Kabupaten Bandung dalam mengembangkan potensi budaya dan pariwisata secara berkelanjutan. Dengan berbagai program inovatif, peningkatan infrastruktur, serta kerja sama dengan berbagai pihak, DISBUDPAR mampu mencapai target yang telah ditetapkan dan bahkan melampauinya.

Gambar berikut menampilkan prestasi-prestasi yang telah diraih sepanjang tahun 2024, yang menjadi bukti nyata dari dedikasi dan upaya

dalam memajukan sektor kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Bandung.



Gambar 3.38
Prestasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024

Setelah melihat berbagai capaian ini, langkah selanjutnya adalah terus mempertahankan serta meningkatkan standar pelayanan, memperluas promosi wisata, dan mengembangkan inovasi baru guna memastikan pertumbuhan sektor ini tetap berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berikut penjelasan berkaitan dengan prestasi selama tahun 2024;

1. Prestasi dalam Bidang Budaya

a. Penetapan 7 Situs Cagar Budaya

Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah berhasil menetapkan tujuh situs sebagai **cagar budaya**, yang menjadi bagian dari sejarah dan identitas daerah. Penetapan ini bertujuan untuk melindungi, melestarikan, serta mempromosikan nilai sejarah dan budaya yang terkandung dalam situs-situs berikut:

1) **Candi Bojongmenje** – Merupakan peninggalan sejarah yang diyakini berasal dari masa klasik Hindu-Buddha dan menjadi bukti peradaban awal di daerah Bandung.

2) **Candi Bojongemas** – Struktur arkeologi yang memiliki nilai sejarah penting bagi perkembangan budaya masyarakat sekitar.
3) **Makam Leluhur Bandung** – Salah satu tempat bersejarah yang menjadi bukti perjalanan leluhur masyarakat Bandung dalam membangun daerah.
4) **Eks Stasiun Radio NIROM Rancaekek** – Sebuah bangunan bersejarah yang dahulu menjadi salah satu pusat penyiaran penting di era kolonial.
5) **Klinik Pratama Pasir Junghuhn** – Klinik yang memiliki nilai historis terkait dengan perkembangan layanan kesehatan di masa lalu.
6) **Pabrik Kina Bukit Unggul** – Merupakan saksi bisu kejayaan produksi kina di Indonesia, yang dahulu menjadi komoditas unggulan dalam dunia kesehatan.
7) **Gedong Mayang Galuh Wangi – R.A.A Wiranata Kusumah V** Bangunan bersejarah yang erat kaitannya dengan perkembangan budaya dan kepemimpinan di masa lalu.

Penetapan situs-situs ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan warisan budaya, serta menjadi daya tarik wisata sejarah yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

b. Penetapan Upacara Adat Wuku Taun Cikondang sebagai Kekayaan Intelektual Komunal

Upacara adat Wuku Taun Cikondang adalah salah satu tradisi yang masih lestari di Kabupaten Bandung. Tradisi ini memiliki makna spiritual dan sosial yang mendalam, di mana masyarakat berkumpul untuk melaksanakan ritual sebagai bentuk syukur dan penghormatan terhadap leluhur. Dengan ditetapkannya sebagai Kekayaan Intelektual Komunal oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), upacara ini kini memiliki perlindungan hukum agar tetap lestari dan tidak diklaim oleh pihak lain.

c. Penetapan Kesenian Beluk sebagai Kekayaan Intelektual Komunal

Kesenian Beluk adalah salah satu bentuk seni tradisional khas Sunda yang mengandalkan teknik vokal unik dengan nada tinggi. Kesenian ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan tetapi juga memiliki nilai historis dan filosofis yang kuat dalam kehidupan masyarakat Sunda. Dengan ditetapkannya sebagai Kekayaan Intelektual Komunal oleh Kemenkumham, seni Beluk diakui sebagai bagian penting dari identitas budaya Kabupaten Bandung dan harus terus dilestarikan.

d. Penghargaan dalam Sidang Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia 2024

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung mendapatkan penghargaan atas partisipasi, kerja sama, dan dukungan dalam pengusulan karya budaya pada Sidang Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2024. Penghargaan ini menunjukkan peran aktif Kabupaten Bandung dalam menjaga dan memperjuangkan pelestarian budaya lokal agar mendapat pengakuan nasional.

Penetapan Kalua Jeruk dan Leuhang sebagai Warisan Budaya Takbenda

Dua produk khas Kabupaten Bandung, Kalua Jeruk (makanan khas berbahan dasar jeruk) dan Leuhang (kuliner khas berbasis fermentasi), telah resmi ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Penetapan ini memberikan perlindungan terhadap kuliner khas daerah, sehingga keunikan dan autentisitasnya tetap terjaga di tengah perkembangan zaman.

2. Prestasi dalam Pengembangan Destinasi Wisata

Sebagai salah satu daerah dengan potensi wisata yang besar, Kabupaten Bandung terus berupaya mengembangkan destinasi wisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Berbagai inovasi dilakukan untuk meningkatkan daya tarik wisata,

kenyamanan pengunjung, serta mendukung pariwisata ramah Muslim. Beberapa destinasi wisata di Kabupaten Bandung berhasil meraih penghargaan di tingkat nasional, membuktikan bahwa sektor pariwisata di daerah ini semakin berkembang dan mampu bersaing dengan destinasi lainnya di Indonesia. Berikut adalah beberapa prestasi yang telah diraih dalam pengembangan destinasi wisata:

a. Desa Wisata Lebak Muncang Masuk 300 Besar Anugerah Desa Wisata Indonesia

Desa Wisata Lebak Muncang berhasil masuk dalam 300 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI), yang merupakan penghargaan bergengsi bagi desa wisata di seluruh Indonesia. Desa ini menawarkan keunikan budaya, keindahan alam, serta berbagai kegiatan wisata berbasis masyarakat, seperti pertanian organik dan wisata edukasi.

b. Sindangreret Ciwidey Sebagai Restoran Ramah Muslim Terbaik ke-3

Restoran Sindangreret Ciwidey berhasil meraih penghargaan sebagai Restoran/Rumah Makan Ramah Muslim Terbaik ke-3 dalam ajang Smiling West Java Muslim Friendly Tourism Award 2024. Penghargaan ini menunjukkan bahwa Sindangreret memiliki fasilitas dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim, termasuk dalam aspek halal dan kenyamanan ibadah.

c. Kawah Putih sebagai Daya Tarik Wisata Alam Ramah Muslim Terbaik ke-3

Kawah Putih, salah satu destinasi wisata unggulan Kabupaten Bandung, meraih penghargaan sebagai Daya Tarik Wisata Alam Ramah Muslim Terbaik ke-3. Pengakuan ini membuktikan bahwa destinasi ini tidak hanya memiliki keindahan alam yang luar biasa, tetapi juga menyediakan fasilitas yang mendukung kenyamanan wisatawan Muslim.

3. Prestasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas layanan, pelestarian budaya, serta pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Berbagai program inovatif dan kolaboratif telah dilakukan untuk mendukung kemajuan budaya dan pariwisata di wilayah ini. Sebagai hasil dari upaya tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung berhasil meraih berbagai penghargaan dan pengakuan baik di tingkat daerah maupun nasional. Prestasi-prestasi ini menjadi bukti nyata dari kerja keras dalam membangun sektor kebudayaan dan pariwisata yang lebih maju dan berdaya saing tinggi. Berikut adalah beberapa pencapaian yang telah diraih:

a. Public Service of the Year Jabar & Banten 2024

DISBUDPAR Kabupaten Bandung mendapat penghargaan sebagai *"Public Service of the Year Jabar & Banten 2024"* dalam ajang *Public Services Award Jawa Barat & Banten 2024*, yang diselenggarakan oleh Indonesia Marketing Festival by Markplus Institute. Penghargaan ini diberikan atas inovasi dan peningkatan layanan dalam pengelolaan sektor pariwisata dan kebudayaan.

b. Peringkat IV dalam Capaian Target Penerimaan PAD Sektor Retribusi Daerah

DISBUDPAR Kabupaten Bandung berhasil meraih peringkat IV dalam kategori capaian target penerimaan PAD sektor retribusi daerah, dengan capaian sebesar 105,98% dari target yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan efektivitas pengelolaan retribusi pariwisata serta meningkatnya kontribusi sektor ini terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

c. Juara 3 Lomba Short Movie Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA)

Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, DISBUDPAR Kabupaten Bandung turut berpartisipasi dalam lomba Short Movie HAKORDIA dan berhasil meraih juara ke-3. Prestasi ini menunjukkan kepedulian instansi terhadap isu transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan melalui media kreatif.

Prestasi-prestasi ini membuktikan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung terus berkomitmen dalam mengembangkan sektor pariwisata dan melestarikan budaya daerah. Upaya yang telah dilakukan tidak hanya meningkatkan citra Kabupaten Bandung sebagai destinasi unggulan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal dalam aspek ekonomi dan sosial.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung pada Tahun Anggaran 2024 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Tahun 2021 - 2026.

Penyusunan LKIP oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) selain sebagai bahan evaluasi juga sebagai bahan pertanggungjawaban Dinas / Badan / Lembaga dalam penyusunan LKIP berupaya menggambarkan secara lebih detail, transparan dan akuntabel dari hasil capaian kegiatan. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut: Pada tahun 2024 DISBUDPAR telah berusaha memenuhi indikator kinerja utama, yang pengukurannya telah sesuai dengan sasaran, indikator, target yang ditetapkan, realisasi dan pencapaian target. Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa pencapaian hasil kinerja DISBUDPAR berdasarkan Perjanjian Kinerja pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Dalam indikator Nilai Index Pembangunan Kebudayaan capaian kinerja pada periode tahun 2024 Terealisasi 56,19 Poin atau sebesar 110,59%. Angka tersebut apabila dikaitkan dengan target Perubahan Renstra DISBUDPAR 2021-2026 pada tahun 2024 dari target sebesar 51 Point. Capaian Indikator ini pada tahun 2024 melebihi target walaupun tidak signifikan hal ini disebabkan belum optimalnya formasi sumber daya manusia (SDM) yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung.
2. Dalam indikator Nilai Index Pembangunan Kepariwisataan capaian kinerja pada periode tahun 2024 Terealisasi 12,77 %. Angka tersebut apabila dikaitkan dengan target Perubahan Renstra DISBUDPAR 2021-2026 pada tahun 2024 dari target sebesar 5%.

3. Capaian kinerja Presentase persentase pertumbuhan jumlah pelaku ekonomi kreatif disbudpar pada periode tahun 2024 terealisasi 1,60 % atau capaian sebesar 160% dari target pada Renstra tahun 2024 yaitu 1%. Hal ini menunjukan pertumbuhan Pelaku ekonomi kreatif yang cukup signifikan.
4. Capaian kinerja Meningkatnya Tatakelola Disbudpar yang terdiri dari dua indikator yaitu Capaian nilai AKIP dan Presentase Aset dalam kondisi baik. Walaupun Sasaran ini bukan merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung karena tidak berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung akan tetapi sasaran ini ikut menunjang kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan tugas. Adapun Capaian kinerja Indikator Capaian nilai AKIP DISBUDPAR pada tahun 2024 adalah 101.38% hal ini dikarenakan capaian nilai AKIP DISBUDPAR mencapai 81.10 poin Point sementara target yang ditetapkan adalah 81 Point. Sedangkan untuk capaian kinerja indikator presentase aset dalam kondisi baik pada tahun 2024 mencapai 10,28% hal ini dikarenakan capaian target Persentase Aset dalam Kondisi Baik sebesar 93.2 % dari target sebesar 93% capaian kinerja ini mengalami peningkatan karena ada mutasi aset ke BKAD dan adanya penghapusan aset dalam kondisi rusak berat.
5. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024 terdapat pelaksanaan 9 Program, 21 Kegiatan dan 58 Subkegiatan yang dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 32.435.458.254 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 27.753.094.994 dan Belanja Modal sebesar Rp. 4.682.363.260. selain itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 1.450.000.000 dari Retribusi Daerah.

Untuk mencapai optimalisasi dari tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung yang direalisasikan

melalui berbagai program dan kegiatan, perlu adanya kesinambungan kegiatan dengan didukung dana yang memadai serta fasilitas/sarana penunjang lainnya. Oleh karena itu, program dan kegiatan yang memerlukan adanya kesinambungan akan terus diusulkan sebagai program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Bandung.